

**PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL  
DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP  
MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2013-2017)**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan*

*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*



Disusun oleh :

**WINDA DIKA APRILIA PRATAMA**  
**15101155110164**

Konsentrasi : Perpajakan

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK” PADANG**

**2019**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan ( Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 ). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebanyak 21 perusahaan mulai 2013-2017. Analisis menggunakan statistik deskriptif dan model regresi data panel.

Berdasarkan hasil model regresi data panel, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan secara bersama-sama terhadap Manajemen Pajak Perusahaan, terdapat kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan, Tata Kelola Perusahaan terdapat pengaruh yang negative tetapi signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan.

**Kata Kunci : Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.**

## **ABSTRACT**

*This aims to analyze the influence of compensation management, institutional ownership, and corporate governance to corporate tax management of manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange as many 21 companies from 2013-2017. The analyses used descriptive statistics and panel data regression models.*

*Based on the result of panel data regression model, the test result show simultaneously compensation management, institutional ownership, and corporate governance have a significant effect impact on corporate tax management. Compensation management has not significant effect to corporate tax management, institutional ownership has not significant effect to effect to corporate tax management, corporate governance has negative effect and significant to corporate tax management.*

***KeyWords : Compensation Management, Institutional Ownership, Corporate Governance, Corporate Tax Management.***

## KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas kasih sayang, rahmad dan kekuatan yang dilimpahkan-Nya serta shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada Nabi MUHAMMAD SAW, yang telah membawa sinar dan ilmu pengetahuan kepada umat manusia. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TARHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 )**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan. Penulis menyadari penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan ketulusan dan keikhlasan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak H. Herman Nawas, Ketua Yayasan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sarjon Defit, S.Kom., M.Sc., Rektor Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
3. Bapak Dr. H. Elfiswandi, S.E., M.M., Ak, CA., Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.

4. Ibu Dessy Haryani, S.E., M.M., Ak, CA., Ketua Program Studi Jurusan Manajemen Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang.
5. Ibu Yosi Yulia, S.E., M.M., Ak, CA., sebagai Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan dan saran-saran serta petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
6. Ibu Rindy Citra Dewi, S.E., M.M., sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan dan saran-saran serta petunjuk yang sangat berharga bagi penulis.
7. Seluruh staff dosen dan karyawan/ti Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang yang dengan ikhlas membagikan ilmu, nasehat dan informasi–informasi yang sangat berguna.
8. Seluruh staff dan karyawan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kota Padang yang telah membantu penulis dalam mencari bahan-bahan yang sehubungan dengan skripsi yang penulis buat.
9. Seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.

Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis mengakui masih banyak kekurangan. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan kontribusi positif bagi kita semua.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan.

Padang, Januari 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.5.2. Manfaat Penelitian .....	9

### **BAB II LANDASAN TEORI, TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS**

2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pengertian pajak.....	11
2.1.1.1 Fungsi Pajak .....	14
2.1.1.2. Jenis Pajak .....	15
2.1.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak .....	22
2.1.1.4 Timbulnya Utang Pajak.....	25
2.1.1.5 Hapusnya Utang Pajak .....	25

2.1.1.6 Sistem Perpajakan .....	27
2.1.1.7 Istilah Undang-Undang Perpajakan .....	27
2.1.2 Manajemen Pajak Perusahaan.....	31
2.1.2.1 Sejarah Manajemen Pajak .....	31
2.1.2.2 Pengertian Manajemen Pajak Perusahaan .....	34
2.1.2.3 Fungsi Manajemen Pajak .....	34
2.1.2.4 Tujuan manajemen Pajak .....	35
2.1.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak.....	36
2.1.3 Kompensasi Manajemen .....	37
2.1.3.1 Sejarah kompensasi Manajemen .....	37
2.1.3.2 Pengertian Kompensasi manajemen.....	38
2.1.3.3 Tujuan Kompensasi Manajemen .....	39
2.1.3.4 Jenis-Jenis Kompensasi Manajemen .....	41
2.1.4. Kepemilikan Institusional .....	42
2.1.4.1 Pengertian Kepemilikan Institusional.....	42
2.1.5 Tata Kelola Perusahaan .....	45
2.1.5.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan .....	46
2.1.5.2 Tujuan Tata Kelola Perusahaan.....	49
2.1.5.3 Manfaat Tata Kelola Perusahaan.....	49
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	50
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	64
2.4 Kerangka Fikir .....	67

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Objek Penelitian .....	68
3.2 Desain Penelitian .....	68
3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Variabel Penelitian .....	68
3.3.1 Variabel Penelitian .....	69
3.3.2 Variabel Dan Defenisi Operasional.....	69
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	73
3.4.1 Sumber Data .....	73



3.4.2 Teknik Pengumpulan Data .....	73
3.5 Populasi dan Sampel.....	74
3.5.1 Populasi .....	74
3.5.2 Sampel .....	75
3.6 Metode Analisis Data .....	79
3.6.1 Analisis Deskriptif .....	79
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	79
3.6.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel.....	81
3.6.4 Analisis Regresi Linier Berganda .....	83
3.6.5 Uji Hipotesis .....	84

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia .....	87
4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia.....	87
4.1.2 Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia.....	90
4.1.3 Profil dan Sejarah Singkat Perusahaan Sampel.....	91
4.2 Metode Analisis Data .....	104
4.2.1 Analisis Deskriptif .....	104
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	105
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	105
4.2.2.2 Uji Multikolinearitas .....	106
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas .....	107
4.2.3 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	108
4.2.3.1 Uji chow .....	108
4.2.3.2 Uji Hausman.....	109
4.2.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel .....	110
4.2.5 Uji Hipotesis .....	112
4.2.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis (uji statistic F) .....	112
4.2.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis (uji Statistik t) .....	113
4.2.5.3 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi.....	115
4.3 Hasil Pembahasan Penelitian .....	116

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....120  
5.2 Saran.....120

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	56
Tabel 3.1 Operasional Dan Pengukuran Tabel .....	72
Tabel 3.2 Kriteria Pengambilan Sampel .....	76
Tabel 3.3 Daftar Perusahaan Yang dijadikan Sampel .....	77
Tabel 4.1 Tabel Sejarah Bursa Efek Indonesia.....	89
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	104
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas .....	106
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	108
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow .....	109
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman.....	110
Tabel 4.6 Hasil Regresi Linear Berganda .....	111
Tabel 4.7 Hasil Uji F Statistik.....	113
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	115
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis .....	116

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran.....	67
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera Test .....	105

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Rekap Tabulasi .....
Lampiran 2 : Tabulasi Data Eviews .....
Lampiran 3 : Hasil Eviews 9.....

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia**

##### **4.1.1 Sejarah Bursa Efek Indonesia**

Dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu *Indonesia Stock Exchange* dijelaskan mengenai Bursa Efek Indonesia dan Pasar Modal Bursa Efek adalah sistem yang terorganisir dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Bursa Efek Indonesia adalah salah satu bursa saham yang dapat memberikan peluang investasi dan sumber pembiayaan dalam upaya membangun perekonomian nasional.

Sejarah Bursa Efek Indonesia berawal dari berdirinya Bursa Efek di Batavia pada abad 19. Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia pada tanggal 14 Desember 1912. Dengan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Bursa Batavia sempat ditutup selama periode perang dunia pertama dan dibuka lagi pada tahun 1925. Pemerintah kolonial belanda juga mengoperasikan bursa parallel di Semarang dan Surabaya. Namun kegiatan bursa ini dihentikan lagi pada masa pendudukan oleh tentara Jepang di Batavia. Pada tahun 1952, tujuh tahun setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, bursa saham dibuka lagi di Jakarta dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan

Belanda sebelum perang dunia. Kegiatan bursa saham kemudia kembali terhenti lagi ketika pemerintah meluncurkan program nasionalisasi pada tahun 1956.

Bursa saham kembali dibuka tahun 1977 dan ditandatangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) Institusi dibawah Departemen Keuangan. Kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham pun meningkat dan mencapai puncaknya tahun 1990 seiring dengan berkembangnya pasar finansial dan sektor swasta. Pada tanggal 13 juli 1992 bursa saham diswastanisasi menjadi PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) ini mengakibatkan beralihnya fungsi BAPEPAM menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).

Penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007. Bursa Efek Indonesia yang disingkat menjadi BEI atau *Indonesia Stock Exchange (IDX)* merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivits operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabungkan Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivative. Bursa penggabungan mulai beroperasi pada 1 Desember 2007.

**Tabel 4.1**

**Sejarah Bursa Efek Indonesia**

Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh Pemerintah Hindia Belanda
1925 – 1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
10 Agustus 1977	Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM. Pengaktifkan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan <i>go public</i> PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara
1988 – 1990	Paket deregulasi dibidang perbankan dan pasar modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas Bursa terlihat meningkat
16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas Milik Swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ, berubah menjadi BAPEPAM. Tanggal ini diperingati HUT BEJ
10 November	Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995



1995	tentang Pasar Modal. Undang ini berlaku mulai januari 1996
1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
2000	Sistem perdagangan tanpa warkat mulai diaplikasikan di Pasar Modal Indonesia
2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh
2007	Penggabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
02 Maret 2009	Peluncuran perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia

#### **4.1.2 Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia**

##### **1. Visi Bursa Efek Indonesia**

Menjadi Bursa yang Kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

##### **2. Misi Bursa Efek Indonesia**

Menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, edisiensi biaya serta penerapan *good governance*.

### **3. Core Values**

- a. *Teamwork.*
- b. *Integrity*
- c. *Profesionalisme*
- d. *Service excellence*

### **4. Core Comptencies**

- a. *Buildinf Trust*
- b. *Integrity*
- c. *Strive for excellence*
- d. *Customer focus*

#### **4.1.3 Profil dan Sejarah singkat perusahaan sampel**

Dalam penelitian ini, prusahaan *go public* yang menjadi sampel terdiri 22 perusahaan. Gambara umum dari masing-masing perusahaan tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. PT. Akasha Wira International, Tbk (ADES)**

PT. Akasha Wira International, Tbk (“Perusahaan”) didirikan dengan nama PT. Alfindo Putra Setia pada tahun 1985. Nama perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir pada tahun 2010, ketika nama perusahaan diubah menjadi PT. Akasha Wira International, Tbk. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali

perubahan. Perubahan terakhir dibuat dengan Akta Notaris Jose Dima Satria, SH, M.Kn, No. 48 Tanggal 25 Juni 2013 mengenai perubahan atas Kuorum, Hak suara dan keputusan serta mengenai perubahan atas Tugas dan Wewenang Direksi. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah Industri air minum dalam kemasan, Industri roti dan kue, Kembang gula, Makaroni, Kosmetik dan Perdagangan besar.

## **2. PT. Tiga Pilar Sejahtera, Tbk (AISA)**

Perseroan didirikan pada 1992 dengan nama PT. Tiga Pilar Sejahtera oleh Bapak Joko Mogoginta, Bapak Budhi Istanto dan Bapak Priyo Hadisusanto (Almarhum). Pada awal berdirinya, produk utama Perseroan adalah bihun kering dan mie kering. Seiring dengan perkembangan perusahaan pada tahun 1995, Perseroan membangun pabrik baru di Karanganyar, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2000, Perseroan membangun pabrik makanan terintegrasi seluas 25 Ha yang berlokasi di Sragen, Jawa Tengah. Pabrik makanan terintegrasi ini memproduksi bermacam produk makanan olahan atau makanan jadi, bukan hanya bihun kering dan mie kering saja, tetapi juga mie instan, biskuit dan makanan ringan.

## **3. PT. Tria Banyan Tirta, Tbk (ALTO)**

Tri Banyan Tirta Tbk (ALTO) didirikan tanggal 03 Juni 1997 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1997. Kantor pusat ALTO terletak di Kp. Pasir Dalem RT.02 RW.09 Desa Babakan pari, Kecamatan Cidahu Kabupaten

Sukabumi, Jawa Barat 43158 – Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan ALTO adalah bergerak dalam bidang industri air mineral (air minum) dalam kemasan plastik, makanan, minuman dan pengalengan/pembotolan serta industri bahan kemasan. Produksi Air minum dalam kemasan secara komersial dimulai pada tanggal 3 Juni 1997.

#### **4. PT. (BUDI)**

Budi Starch & Sweetener Tbk (sebelumnya Budi Acid Jaya Tbk) (BUDI) didirikan 15 Januari 1979 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Januari 1981. Kantor pusat BUDI berlokasi di Wisma Budi lantai 8-9, Jalan HR. Rasuna Said Kav C-6, Jakarta, sedangkan lokasi pabrik BUDI di Subang, Lampung, Jambi dan Surabaya.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan BUDI terutama meliputi bidang manufaktur bahan kimia dan produk makanan, termasuk produk turunan yang dihasilkan dari ubi kayu, ubi jalar, kelapa sawit, kopra dan produk pertanian lainnya dan industri lainnya khususnya industri plastik. Kegiatan utama Budi Starch & Sweetener bergerak dalam pembuatan dan penjualan tepung tapioka, glukosa dan fruktosa, maltodextrin, sorbitol, asam sitrat, karung plastik, asam sulfat dan bahan-bahan kimia lainnya.

## **5. PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk (CEKA)**

Perusahaan bernama PT. Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk adalah suatu Perseroan Terbatas yang bersedudukan hukum di Kabupaten Bekasi dengan alamat kantor pusat di Jalan Industri Selatan 3 Blok GG No. 1, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi 17550 - Provinsi Jawa Barat - Republik Indonesia. Perusahaan dahulu bernama CV. Tjahaja Kalbar yang didirikan di Pontianak pada tahun 1968. Perusahaan didirikan menjadi Perseroan Terbatas berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI No. C2-1390 HT.01.01. TH.88 tanggal 17 Februari 1988.

## **6. PT. Delta Djakarta, Tbk (DLTA)**

PT. Delta Djakarta, Tbk didirikan pertama kali di Indonesia pada tahun 1932 merupakan perusahaan produksi bir Jerman bernama “Archipel Brouwerij, NV”. Perseroan kemudian dibeli oleh Perusahaan Belanda dan berganti nama menjadi NV De Oranje Brouwerij. Perseroan resmi menggunakan nama PT. Delta Djakarta pada tahun 1970. Pada tahun 1984, PT. Delta menjadi salah satu perusahaan Indonesia pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia), mengukuhkan status sebagai pemain utama industri bir dalam negeri.

## **7. PT. Darya Varia Laboratoria, Tbk (DVLA)**

PT. Darya Varia Laboratoria, Tbk (“Darya-Varia atau perseroan”) adalah perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Indonesia, berdiri sejak tahun 1976. Setelah menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1994, Perseroan

mengakuisisi PT. Pradja Pharin (Prafa) di tahun 1995, dan terus mengembangkan berbagai produk obat resep dan consumer health. Pada Juli 2014 Darya-Varia bergabung (merger) dengan Prafa. Darya-Varia mengoperasikan dua fasilitas manufaktur kelas dunia di Gunung Putrid dan Citeureup, Bogor, keduanya memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) ASEAN. Kedua pabrik tersebut fokus memproduksi produk perseroan serta memberikan jasa toll manufacturing untuk pelaku nasional dan multinasional baik untuk pasar lokal maupun ekspor.

#### **8. PT. Gudang Garam, Tbk (GGRM)**

PT. Gudang Garam, Tbk (dahulu PT. Perusahaan Rokok Tjap) didirikan tanggal 26 Juni 1958 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1958. Kantor pusat Gudang Garam beralamat di Jl. Semampir II/1, Kediri Jawa Timur, serta memiliki pabrik yang berlokasi di Kediri Gempol Solo-Kartasura, Karanganyar dan Sumenep. Selain itu, GGRM juga memiliki kantor perwakilan di Jl. Jnderal A. Yani 79, Jakarta dan Jl. Pangelal 7-15, Surabaya-Jawa Timur. Pemegang saham yang memiliki 5 % atau lebih saham Gudang Garam Tbk adalah PT. Suryaduta Investama (69,29%) dan PT. Suryamitra Kusuma (6,26%). PT. Suryamitra Kusuma merupakan induk usaha dan induk usaha dan induk usaha terakhir GGRM.

#### **9. PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk (HMSP)**

PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk (untuk selanjutnya disebut sebagai “Sampoerna” atau “Perseroan”) merupakan perusahaan rokok terkemuka di

Indonesia. Perseroan memproduksi sejumlah kelompok merek rokok kretek yang telah dikenal luas, diantaranya Sampoerna A, Sampoerna Kretek, Sampoerna U dan Dji Sam Soe, yang merupakan “Raja Kretek” yang legendaries. Perseroan adalah anak perusahaan dari PT. Philip Morris Indonesia (“PMDI”) dan afiliasi dari Philip Morris International Inc (“PMI”), perusahaan rokok internasional terkemuka dunia. Pada tahun 2016, sampoerna berhasil mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar dengan pangsa pasar sebesar 33,4 % dari pasar rokok di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan meliputi, antara lain manufaktur, perdagangan dan distribusi rokok.

#### **10. PT. Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk (ICBP)**

Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) didirikan 02 September 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1 Oktober 2009. ICBP merupakan hasil pengalihan kegiatan usaha Divisi Mie Instan dan Divisi Penyedap Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), pemegang saham pengendali. Kantor pusat Indofood CBP berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 23, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 76-78, Jakarta 12910, Indonesia, sedangkan pabrik perusahaan dan anak usaha berlokasi di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Malaysia. Induk usaha dari Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah INDF, dimana INDF memiliki 80,53% saham yang ditempatkan dan disetor penuh ICBP, sedangkan induk usaha terakhir dari ICBP adalah First Pacific Company Limited (FP), Hong Kong.

## **11. PT. IIKP**

Inti Agri Resources Tbk (dahulu Inti Kapuas Arowana Tbk) (IIKP) didirikan tanggal 16 Maret 1999 dengan nama PT Inti Indah Karya Plasindo dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1999. Kantor pusat IIKP terletak di Puri Britania Blok T7, No. B27-29, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 11610 – Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Inti Agri Resources Tbk, yaitu: PT Maxima Agro Industri (pengendali) (7,88%) dan PT Atria Axes Management (5,27%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan IIKP terutama bergerak dalam bidang perikanan, perdagangan, industri dan perkebunan. Saat ini, kegiatan usaha IIKP adalah penangkaran ikan, pembudidayaan dan perdagangan ikan arowana super red dengan merek dagang ShelookRED.

## **12. PT. Indofarma (Persero), Tbk (INAF)**

Indonesia Farma (Persero) Tbk disingkat Indofarma (Persero) Tbk (INAF) didirikan tanggal 02 Januari 1996 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1983. Kantor pusat dan pabrik INAF terletak di Jalan Indofarma No.1, Cibitung, Bekasi 17530 – Indonesia.

Pada awalnya, INAF merupakan sebuah pabrik obat yang didirikan pada tahun 1918 dengan nama pabrik Obat Manggarai. Pada tahun 1950, Pabrik Obat



Manggarai ini diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dikelola oleh Departemen Kesehatan. Pada tahun 1979, nama pabrik obat ini diubah menjadi Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan. Kemudian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.20 tahun 1981, Pemerintah menetapkan Pusat Produksi Farmasi Departemen Kesehatan menjadi Perseroan Umum Indonesia Farma (Perum Indofarma). Selanjutnya pada tahun 1996, status badan hukum Perum Indofarma diubah menjadi Perusahaan (Persero).

### **13. PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk (MLBI)**

Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) didirikan 03 Juni 1929 dengan nama N.V. Nederlandsch Indische Bierbrouwerijen dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1929. Kantor pusat MLBI berlokasi di Talavera Office Park Lantai 20, Jl. Let. Jend. TB. Simatupang Kav. 22-26, Jakarta 12430, sedangkan pabrik berlokasi di Jln. Daan Mogot Km.19, Tangerang 15122 dan Jl. Raya Mojosari – Pacet KM. 50, Sampang Agung, Jawa Timur. Pemegang saham yang memiliki 5 % atau lebih saham Multi Bintang Indonesia Tbk adalah Heineken International BV (pengendali) (81,78%). Multi Bintang Indonesia Tbk merupakan bagian dari Grup Asia Pacific Breweries dan Heineken, dimana pemegang saham utama adalah Fraser & Neave Ltd. (Asia Pacific Breweries) dan Heineken N.V. (Heineken).

#### **14. PT. Mayora Indah, Tbk (MYOR)**

Mayora Indah Tbk (MYOR) didirikan 17 Februari 1977 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Mei 1978. Kantor pusat Mayora berlokasi di Gedung Mayora, Jl.Tomang Raya No. 21-23, Jakarta 11440 – Indonesia, dan pabrik terletak di Tangerang dan Bekasi. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mayora Indah Tbk, yaitu PT Unita Branindo (32,93%), PT Mayora Dhana Utama (26,14%) dan Jogi Hendra Atmadja (25,22%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Mayora adalah menjalankan usaha dalam bidang industri, perdagangan serta agen/perwakilan. Saat ini, Mayora menjalankan bidang usaha industri biskuit (Roma, Danisa, Royal Choice, Better, Muuch Better, Slai O Lai, Sari Gandum, Sari Gandum Sandwich, Coffeejoy, Chees'kress.), kembang gula (Kopiko, KIS, Tamarin dan Juizy Milk), wafer (beng beng, Astor, Roma), coklat (Choki-choki), kopi (Torabika dan Kopiko) dan makanan kesehatan (Energen) serta menjual produknya di pasar lokal dan luar negeri.

#### **15. PT. Nippon Indosari Corporindo, Tbk (ROTI)**

Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) (Sari Roti) didirikan 08 Maret 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dan mulai beroperasi komersial pada tahun 1996. Kantor pusat dan salah satu pabrik ROTI berkedudukan di Kawasan

Industri MM 2100 Jl. Selayar blok A9, Desa Mekarwangi, Cikarang Barat, Bekasi 17530 – Jawa Barat, dan pabrik lainnya berlokasi di Kawasan Industri Jababeka Cikarang blok U dan W – Bekasi, Pasuruan, Semarang, Makassar, Purwakarta, Palembang, Cikande dan Medan. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Nippon Indosari Corpindo Tbk, antara lain: Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET) (31,50%), Bonlight Investments., Ltd (25,03%) dan Pasco Shikishima Corporation (8,50%).

#### **16. PT. Sekar Bumi, Tbk (SKBM)**

Sekar Bumi Tbk (SKBM) didirikan 12 April 1973 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1974. Kantor pusat SKBM berlokasi di Plaza Asia, Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190 – Indonesia dan pabrik berlokasi di Jalan Jenggolo 2 No. 17 Waru, Sidoarjo serta tambak di Bone dan Mare, Sulawesi. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Sekar Bumi Tbk, yaitu: TAEL Two Partners Ltd. (32,14%), PT Multi Karya Sejati (pengendali) (9,84%), Berlutti Finance Limited (9,60%), Sapphira Corporation Ltd (9,39%), Arrowman Ltd. (8,47%), Malvina Investment (6,89%) dan BNI Divisi Penyelamatan & Penyelesaian Kredit Korporasi (6,14%).

### **17. PT. Mandom Indonesia, Tbk (TCID)**

Mandom Indonesia Tbk (TCID) didirikan tanggal 5 November 1969 dengan nama PT Tancho Indonesia dan mulai memproduksi secara komersial pada bulan April 1971. Kantor pusat TCID terletak di Kawasan Industri MM 2100, Jl. Irian Blok PP, Bekasi 17520. Sedangkan pabrik berlokasi di Sunter, Jakarta dan Kawasan Industri MM2100, Cibitung-Jawa Barat. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Mandom Indonesia Tbk, antara lain: Mandon Corporation, Jepang (60,84%) dan PT Asia Jaya Paramita (11,32%). Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TCID meliputi produksi dan perdagangan kosmetika, wangi-wangian, bahan pembersih dan kemasan plastik termasuk bahan baku, mesin dan alat produksi untuk produksi dan kegiatan usaha penunjang adalah perdagangan impor produk kosmetika, wangi-wangian, bahan pembersih.

### **18. PT. Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk (ULTJ)**

Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) didirikan tanggal 2 November 1971 dan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 1974. Kantor pusat dan pabrik Ultrajaya berlokasi di Jl. Raya Cimareme 131 Padalarang – 40552, Kab. Bandung Barat. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, antara lain: PT Prawirawidjaja Prakarsa (21,40%), Tuan Sabana Prawirawidjaja (14,66%), PT Indolife Pensiontana (8,02%),

PT AJ Central Asia Raya (7,68%) dan UBS AG Singapore Non-Treaty Omnibus Acco (Kustodian) (7,42%).

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Ultrajaya bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman, dan bidang perdagangan. Di bidang minuman Ultrajaya memproduksi rupa-rupa jenis minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman tradisional dan minuman kesehatan, yang diolah dengan teknologi UHT (Ultra High Temperature) dan dikemas dalam kemasan karton aseptik. Di bidang makanan Ultrajaya memproduksi susu kental manis, susu bubuk, dan konsentrat buah-buahan tropis. Ultrajaya memasarkan hasil produksinya dengan cara penjualan langsung (direct selling), melalui pasar modern (modern trade).

#### **19. PT. Unilever Indonesia, Tbk (UNVR)**

Unilever Indonesia Tbk (UNVR) didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933. Kantor pusat Unilever berlokasi di Grha Unilever, BSD Green Office Park Kav. 3, Jln BSD Boulevard Barat, BSD City, Tangerang 15345, dan pabrik berlokasi di Jl. Jababeka 9 Blok D, Jl. Jababeka Raya Blok O, Jl. Jababeka V Blok V No. 14-16, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, serta Jl. Rungkut Industri IV No. 5-11, Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur. Induk usaha Unilever Indonesia adalah Unilever Indonesia Holding B.V. dengan

persentase kepemilikan sebesar 84,99%, sedangkan induk usaha utama adalah Unilever N.V., Belanda.

#### **20. PT. Wismilak Inti Makmur, Tbk (WIIM)**

Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) didirikan tanggal 14 Desember 1994 dan dan memulai kegiatan komersial pada tahun 1963. Kantor pusat Wismilak beralamat di Jl. Buntaran No. 9A, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Surabaya 60185 dan kantor perwakilan berlokasi di Gedung Menara Jamsostek Menara Utara, Lantai 10, Suite 1003, Jl. Gatot Subroto 38, Jakarta 12710 – Indonesia. Kegiatan operasional Wismilak telah ditandai dengan mulainya aktivitas komersial pada tahun 1963 oleh PT Gelora Djaja, salah satu anak usah yang hingga kini memproduksi semua merek rokok WIIM. PT Gelora Djaja didirikan antara lain oleh Lie Koen Lie, Oei Bian Hok, Tjioe Ing Hien, Tjioe Eng (Ing) Hwa, Tjioe Eng Tik dan Sie Po Nio di Petemon, Surabaya.

#### **21. PT. Martina Berto, Tbk (MBTO)**

Martina Berto Tbk (MBTO) didirikan tanggal 01 Juni 1977 dan mulai beroperasi secara komersial sejak bulan Desember 1981. Kantor pusat MBTO berlokasi di Jl. Pulo Kambing II No.1, Kawasan Industri Pulogadung (JIEP), Jakarta Timur 13930, dengan pabrik berlokasi di Pulo Kambing dan Gunung Putri, Bogor.

PT Martina Berto adalah manufaktur, perusahaan pemasaran, serta penelitian & pengembangan merek yang ada di Martha Tilaar Group. PT Martina Berto pada Rabu, Desember 8 Maret 2010, pukul 10.00 akan melakukan due dilligence Rapat dan Paparan Publik, penawaran umum perdana PT Martina Berto Tbk. saham di Ritz Carlton Hotel Ballroom, Pacific Place dan dengan Januari 2011, PT Martina Berto akan Go Publik.

## 4.2 Metode Analisis Data

### 4.2.1 Analisis Deskriptif

**Tabel 4.2**

**Tabel Hasil Uji Statistic Deskriptif**

	Y	X1	X2	X3
Mean	-0.062000	23.65419	72.71343	0.403714
Median	-0.200000	23.91000	80.62000	0.330000
Maximum	0.740000	27.01000	108.4700	1.000000
Minimum	-0.840000	14.18000	5.140000	0.160000
Std. Dev.	0.276014	1.940817	21.81133	0.141607
Observations	105	105	105	105

*Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018*

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan secara deskripti variable-variabel dalam penelitian ini. Variable Kompensasi Manajemen memiliki nilai rata-rata sebesar 23,65419 dengan stndar devisiasi 1,940817. Nilai maksimum sebesar 27,01000 dan nilai minimum sebesar 14,18000. variable Kepemilikan Institusinal memiliki rata-rata sebesar 72,71343 dengan standar devisiasi 21,81133. Nilai maksimum sebesar

108,4700 dan nilai minimum sebesar 5,140000. Variabel tata kelola perusahaan memiliki nilai rata-rata 0,403714 dengan standar deviasi sebesar 0,141607. Nilai maksimum sebesar 1,000000 dan nilai minimum sebesar 0,160000.

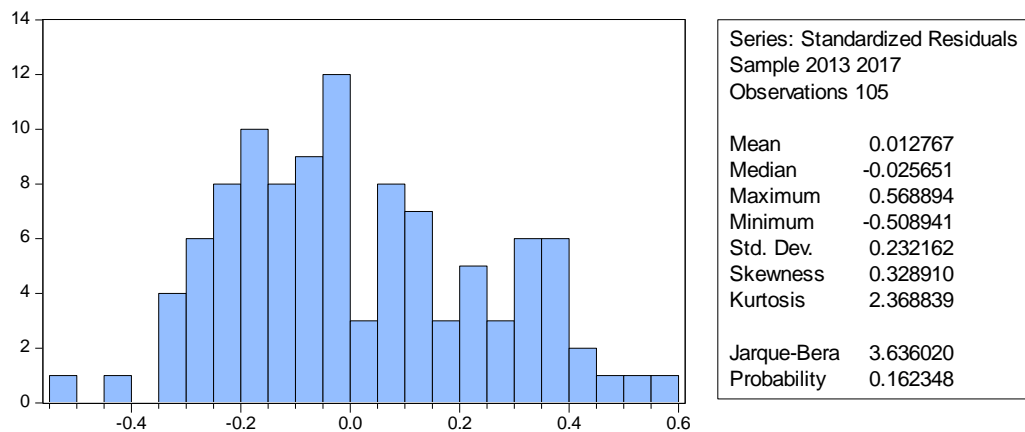
## 4.2.2 Uji Asumsi Klasik

### 4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Sehingga apabila data kontinu telah berdistribusi normal maka data bisa dilanjutkan ke tahap uji berikutnya. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai probabilitas  $> 0,05$  maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk menguji apakah data bersifat normal atau tidak maka peneliti menggunakan pengujian normalitas dilakukan dengan *Jarque-Bera test* sebagai berikut :

**Gambar 4.1**

### Hasil Uji Normalitas Jarque-Bera Test



Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai probabilitas *jarque-Bera* adalah sebesar 0,162348 lebih besar dari taraf nyata yang digunakan ( $\alpha = 5\%$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Deteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai tolerance dan lawannya VIF. Adapun hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan matriks korelasi adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.000168	160.1592	1.060871
X2	1.38E-06	13.48171	1.103184
X3	0.034339	10.65253	1.157115
C	0.091908	155.9280	NA

*Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018*

Berdasarkan tabel diatas nilai VIF dilihat pada bagian *Centered* VIF. Nilai VIF untuk variable kompensasi manajemen sebesar 1,060871 artinya variabel ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai  $VIF < 10$ , untuk variable kepemilikan institusional sebesar 1,103184 artinya variabel ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai  $VIF < 10$ , untuk variable tata kelola perusahaan sebesar 1,157115 artinya variabel ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai  $VIF < 10$ . Sehingga kesimpulannya bahwa semua variabel independen kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terbebas dari asumsi klasik multikolonieritas karena nilai  $VIF < 10$ .

#### **4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah dengan membandingkan nilai probabilitas *obs\*R-squared* dengan tingkat signifikansi yang ditentukan ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil pengujian dapat ditunjukkan pada gambar berikut:

**Tabel 4.3**

**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

---

---

F-statistic	1.119889	Prob. F(3,101)	0.3447
Obs*R-squared	3.380281	Prob. Chi-Square(3)	0.3366
Scaled explained SS	3.429705	Prob. Chi-Square(3)	0.3300

---

---

*Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai *Prob.Obs\*R-squared* > 0,05 yaitu sebesar 0,3366. Artinya bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada penelitian ini.

### **4.2.3 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel**

#### **4.2.3.1 Uji Chow**

Uji Chow digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji chow digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau Model *Common Effect* yang sebaiknya dipakai.

*H0 : Common Effect*

*Ha : Fixed Effect*

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-square* lebih > dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas *Chi-square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*. Hasil uji spesifikasi model adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Chow**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.105992	(20,81)	0.0000
Cross-section Chi-square	73.503781	20	0.0000

*Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section Chi-Square* adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya  $H_a$  diterima, Jadi kesimpulannya model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Maka selanjutnya akan dilakukan uji Hausman apakah akan menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM).

#### 4.2.3.2 Uji Hausman

*Hausman test* adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat digunakan. Setelah selesai melakukan uji Chow

dan jika diperoleh model yang tepat adalah *fixed effect*, maka selanjutnya kita melakukan pengujian untuk memilih model *fixed effect* atau *random effect* yang paling tepat. Jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya (0.05) maka  $H_1$  diterima (model yang tepat adalah model *fixed effect*) dan sebaliknya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

$H_0$  : *Random Effect Model* (REM)

$H_a$  : *Fixed Effect Model* (FEM)

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Hausman**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.129312	3	0.1055

*Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* adalah sebesar  $0,1055 > 0,05$  artinya  $H_a$  ditolak, Jadi kesimpulannya model yang digunakan adalah *Random Effect Model* (REM).

#### 4.2.4 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Analisis regresi data panel dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Manajemen (X1), Kepemilikan Institusional (X2) dan Tata

Kelola Perusahaan (X3) terhadap Manajemen Pajak Perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2017.

Berdasarkan pemilihan model yang telah dilakukan, model yang sebaiknya digunakan adalah model *Random Effect*. kemudian sebelum pemilihan model, data telah dinyatakan telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil estimasi konsisten dan tidak biasa. Hasil estimasi model regresi data panel sebagai berikut :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Estimasi *Random Effect Model***

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.009715	0.013147	0.738931	0.4617
X2	-0.002672	0.001534	-1.741652	0.0846
X3	-0.606858	0.221971	-2.733957	0.0074
C	0.147497	0.325986	0.452465	0.6519

*Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018*

Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai koefisien regresi kompensasi manajemen (X1) sebesar 0,009715, nilai koefisien regresi kepemilikan institusional (X2) sebesar -0,002672, Tata Kelola Perusahaan sebesar -0,606858 dan nilai konstanta sebesar 0,147497. Berdasarkan model estimasi yang dipilih, diperoleh persamaan model regresi data panel sebagai berikut :

$$MPP (Y) = 0,147497 + 0,009715 (X1) - 0,002672 (X2) - 0,606858 (X3) + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 0,147497 artinya jika variable Kompensasi manajemen (X1), kepemilikan institusional (X2) dan tata kelola perusahaan (X3) diabaikan / bernilai nol maka MPP (Y) sebesar konstantanya yaitu 0,147497.
2. Nilai koefisien  $\beta_1$  yaitu sebesar 0,009715 artinya jika Kompensasi Manajemen (X1) meningkat 1 satuan dengan asumsi Kepemilikan Institusional (X2), tata kelola perusahaan (X3) diabaikan atau nol maka MPP (Y) meningkat sebesar 0,009715.
3. Nilai koefisien  $\beta_2$  yaitu sebesar -0,002672 artinya jika kepemilikan institusional (X2) meningkat 1 satuan dengan asumsi kompensasi manajemen (X1), tata kelola perusahaan (X3) diabaikan atau nol maka MPP (Y) menurun sebesar 0,002672.
4. Nilai koefisien  $\beta_3$  yaitu sebesar -0,606858 artinya jika tata kelola perusahaan (X3) meningkat 1 satuan dengan asumsi kompensasi manajemen (X1), kepemilikan innstitusional (X2) diabaikan atau nol maka MPP (Y) menurun sebesar 0,606858.

#### **4.2.5 Uji Hipotesis**

##### **4.2.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji Statistik F)**

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat dan juga untuk mengetahui ketepatan

pemilihan variabel yang akan dibentuk kedalam sebuah model regresi maka dilakukan pengujian F-statistik. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.7**

**Hasil Uji F-Statistik**

---

F-statistic	4.229223
Prob(F-statistic)	0.007349

---

*Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018*

Pada penelitian ini dengan nilai ( $n = 105$ ,  $k=3$ )  $df_1$  ( $df=3-1$  sehingga  $df_1=3-1=2$ ) dan  $df_2$  ( $df_2=n-k$ , sehingga  $df_2=105-3=102$ ). Maka diperoleh hasil untuk  $F_{tabel}$  sebesar 3,09 (tabel F). berdasarkan tabel 4.7 dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan memiliki nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $4,229223 > F_{tabel}$  sebesar 3,09 dan nilai signifikansi sebesar  $0,007349 < 0,05$ . artinya kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

#### **4.2.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji Statistik t)**

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan :

- 1) Apabila probabilitas  $t_{hitung} < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima



2) Apabila probabilitas thitung  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Pada penelitian ini merupakan uji dua arah dengan taraf signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05 dan  $df$  ( $n=105$ ,  $k=3$ ,  $df=n-k$ , sehingga  $df=105-3=102$ ). Maka diperoleh hasil untuk  $t_{tabel}$  sebesar 1,65993 (Tabel t). Berdasarkan tabel 4.6 dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

### **1. Pengujian variabel Kompensasi Manajemen (X1) terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Y).**

Kompensasi Manajemen memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.738931 kecil dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,65993 ( $t_{hitung} 0.738931 < t_{tabel} 1,65993$ ) dan nilai signifikan  $0,4617 > 0,05$ . Artinya Kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### **2. Pengujian variabel Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.**

Kepemilikan Institusional memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,741652 kecil dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,65993 ( $t_{hitung} -1,741652 < t_{tabel} 1,65993$ ) dan nilai signifikan  $0,0846 > 0,05$ . Artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

### 3. Pengujian Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.

Tata Kelola Perusahaan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar yaitu - 2,733957 kecil dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,65993 ( $- 2,733957 t_{hitung} < t_{tabel} 1,65993$ ) dan nilai signifikan  $0,0074 < 0,05$ . Artinya Tata kelola Perusahaan berpengaruh negative tetapi signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

#### 4.2.5.3 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel bebas dalam model terhadap variabel terikatnya, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model, formulasi model yang keliru dan kesalahan eksperimen. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

---

---

R-squared	0.111601	Mean dependent var	-0.030185
Adjusted R-squared	0.085213	S.D. dependent var	0.207817

---

---

*Sumber: Output Eviews 9 dan data sekunder (diolah), 2018*

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi yang dihasilkan dalam pengujian Adjusted R-Square bernilai 0,085213. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel Kompensasi Manajemen (X1), Kepemilikan Institusional (X2) dan Tata Kelola Perusahaan (X3) mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi nilai perusahaan 8,52% sedangkan sisanya 92,48% yang dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengimplikasikan hal – hal sebagai berikut :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian**

Hipotesis	Pernyataan	Prob.	Hasil Hipotesis
H <sub>1</sub>	Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	0.007349	Diterima
H <sub>2</sub>	Kompensasi Manajemen mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang	0.4617	Ditolak

	kosumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.		
H <sub>3</sub>	Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang kosumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	0.0846	Ditolak
H <sub>4</sub>	Tata Kelola Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang kosumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	0.0074	Diterima

**4.3.1 Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan secara bersama-sama terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan memiliki nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $4,229223 > F_{tabel}$  sebesar  $3,09$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,007349 < 0,05$ . artinya kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Pada hipotesis ini belum ada penelitian terdahulu tentang Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan secara bersama-sama terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.

**4.3.2 Pengaruh Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

Kompensasi Manajemen memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.738931 dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,65993 ( $t_{hitung} 0.738931 < t_{tabel} 1,65993$ ) dan nilai signifikan 0,4617 > 0,05. Artinya Kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian **Fahreza (2014)** dimana Kompensasi Manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Kemungkinan dalam paket kompensasi saham mendorong manajer melakukan manajemen pajak untuk efisiensi pembayaran pajak perusahaan. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa manajemen pajak dapat menambah laba bersih perusahaan dan memberi manfaat kepada pemegang saham karena berkaitan positif terhadap tingginya tingkat pengembalian investasi mereka. kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan perbankan di Indonesia. Dengan memberikan kompensasi yang tinggi terhadap manajemen dalam rangka memacu manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan, dapat memotivasi manajemen untuk mencari strategi manajemen pajak yang efektif dengan tujuan memperkecil pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

#### **4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

Kepemilikan Institusional memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar -1,741652 lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  sebesar 1,65993 ( $t_{hitung} -1,741652 < t_{tabel} 1,65993$ ) dan nilai

signifikan  $0,0846 > 0,05$ . Artinya Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Pada hipotesis ini belum ada penelitian terdahulu tentang Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan secara bersama-sama terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.

#### **4.3.4 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

Tata Kelola Perusahaan memiliki nilai  $t_{hitung}$  sebesar yaitu  $- 2,733957$  lebih kecil dari pada  $t_{tabel}$  sebesar  $1,65993$  ( $- 2,733957 < t_{hitung} < t_{tabel} 1,65993$ ) dan nilai signifikan  $0,0074 < 0,05$ . Artinya Tata kelola Perusahaan berpengaruh negative tetapi signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan. Maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian **Meiliza Celara Angela Putri (2017)** Hasil ini menunjukkan bahwa corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan CG dalam perusahaan maka akan semakin efektif dan efisien penerapan manajemen pajak perusahaan. tingkat penerapan CG yang semakin baik akan membuat manajemen akan lebih berhati-hati dalam melakukan penerapan manajemen pajak.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era globalisasi perusahaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, utamanya di pasar modal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan nasional dan pendapatan negara dari sektor pajak yang besar.

Pada kasus yang telah dialami oleh Amie Hamid dalam berita yang dikutip pada kompas (2018), dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menjatuhkan hukuman bagi Amie Hamid pada Senin (8/1/2018) atas tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penerbitan faktur pajak palsu. Amie sebelumnya sudah pernah divonis bersalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dalam kasus tindak pidana perpajakan pada 2016 lalu, namun dari pengembangan penyidikan, ditemui fakta terbaru yang menjerat dia dalam kasus faktur pajak palsu. "Yang bersangkutan divonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 1 miliar subsider tiga bulan kurungan dalam kasus TPPU faktur pajak palsu," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Kamis (11/1/2018). Yoga menjelaskan, semua barang bukti dalam kasus ini dengan nilai total Rp 26,9 miliar rupiah disita oleh penyidik dan menjadi barang rampasan negara. Barang bukti yang dimaksud membuktikan Amie

telah melakukan TPPU dari keuntungan penerbitan faktur pajak palsu, yaitu rumah, apartemen, gedung olahraga, kos-kosan, vila, ruko, kios, kendaraan bermotor, barang elektronik, sampai uang tunai. Dalam amar putusan perkara pertama Amie di PN Jakarta Utara tahun 2016, diperoleh fakta total nilai faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) dari Amie kepada tujuh perusahaan sebesar Rp 123 miliar lebih. Dari sana, penyidik menemukan Amie memperoleh keuntungan Rp 49 miliar lebih yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadi dan bisnisnya. Adapun modus yang dipakai Amie untuk TPPU di antaranya sering transfer uang ke bank dalam jumlah besar, menggunakan uang di rekening bank tersebut untuk pembayaran cicilan aset berupa kendaraan dan hunian, serta memakai uang hasil keuntungan untuk investasi di sejumlah perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengapresiasi upaya penegakkan hukum dalam kasus ini. Yoga berpesan agar para wajib pajak tetap menaati peraturan yang berlaku dan tidak coba-coba untuk mencari keuntungan dengan berbuat curang seperti yang Amie lakukan.

Pajak merupakan pemasukan kas negara yang paling besar, sehingga pajak dapat dilihat dari beberapa segi yaitu dari segi ekonomi, pajak merupakan suatu pemindahan sumber daya yang dimiliki perusahaan ke sektor publik, sedangkan bagi negara pajak adalah sumber penerimaan kas negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam praktik pelaksanaan penerimaan pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan **Suandy (2011:1)**.



Namun, tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak.

Manajemen pajak adalah usaha yang menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi masyarakat.

Menurut **Chairil Anwar Pohan (2014:13)** manajemen pajak merupakan bagian integral dari perencanaan strategi perusahaan yang seharusnya dimulai sebelum suatu usaha dimulai. Pelaksanaan manajemen pajak harus ekonomis, efisien dan efektif.

Menurut **Yussy Santoso Dan Ronni R.Masman (2016:3)** kompensasi manajemen adalah sebuah proses pengelolaan pemberian penghargaan (*rewards*) biasanya dengan mempertimbangkan factor bobot pekerjaan (*job size*), kinerja (*performance*) dan masa kerja (*length of service*). Juga menggambarkan cara pekerja dibayar, diakui dan dihargai yang dipergunakan oleh organisasi untuk mengirim pesannya untuk para pekerja.

Sedangkan menurut **Tarjo** dalam **Rina Susanti (2014:7)** Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor

manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Menurut **Prasetyantoko (2013:5)** corporate governance adalah mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut suatu aturan hak dan kuasa tertentu. Ia mengarahkan aksi individu dalam organisasi dan kegiatan rutin tertentu sesuai dengan suatu muara. Muara itu bias berupa menghasilkan laba sebesar-besarnya dan juga etika social.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tata kelola perusahaan adalah suatu system tata kelola perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Tata kelola perusahaan pada dasarnya tidak dibutuhkan tidak hanya untuk internal perusahaan tetapi juga untuk pihak eksternal. Hal ini akan berhubungan dengan bagaimana pihak eksternal memperoleh informasi dan jaminan terbaik mengenai perusahaan untuk masa yang akan datang.

Penelitian yang dilakukan oleh **Gandi Wahyu Maulana Zulma, Dwi Martani (2015)** dengan judul Pengaruh kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak perusahaan dengan mempertimbangkan fungsi pengawasan komite audit. analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hasil penelitian mengatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh **Khairunnisa R (2014)** dengan judul Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013) analisis yg digunakan adalah regresi linear sederhana dan regresi berganda. Dengan hasil penelitian kompensasi manajemen masing-masing secara persial berpengaruh terhadap kepemilikan institutional terhadap manajemen pajak perusahaan pada (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013) Secara simultan berpengaruh terhadap kepemilikan institutional dan terhadap manajemen pajak perusahaan pada (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013).

Penelitian yang dilakukan oleh **Zulva Yuniati Dan Elva Nuraina (2017)** dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bei 2011-2015 analisis yang digunakan adalah regresi

berganda dengan hasil penelitian Kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap manajemen pajak.

Fenomena yang terjadi sesuai dengan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini apakah system kompensasi manajemen, kepemilikan institutional dan tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen pajak perusahaan studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2013-2017).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **Pengaruh Kompensasi Manajemen Kepemilikan Institutional Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017)** .

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan kajian pada latar belakang, adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia.
2. Manajemen berkawajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat.

3. Adanya hubungan negative yang kuat antara kompensasi yang diterima direktur pajak perusahaan dengan perencanaan pajak.
4. Adanya kesulitan yang dialami dalam mengambil keputusan-keputusan yang tepat di bidang corporate governance.
5. Penerapan corporate governance untuk menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Guna lebih memberikan arahan dan memudahkan dalam penelitian ini maka penulis memfokuskan menganalisa variabel bebas yaitu Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan tata kelola perusahaan dan variabel terikat yaitu manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia?

2. Bagaimana pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institutional terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi Bursa Efek Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia ?

## **1.5 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris serta menganalisis

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi kompensasi manajemen, kepemilikan institutional dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia ?
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi berapa besar pengaruh kompensasi manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan

manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi berapa besar pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi berapa besar pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor Industri barang konsumsi yang terdaftar Bursa Efek Indonesia.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini dari data yang telah dikumpulkan dapat menjadi pertimbangan perusahaan dalam pengembangan dan perbaikan perusahaan.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan dan wawasan bagi dunia akademik berkaitan dengan pengaruh kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

3. Bagi peneliti

yaitu bahan kajian ilmiah dari teori-teori yang pernah didapatkan dibangku kuliah dan mengaplikasikan secara jelas didunia nyata serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti dengan menerapkan teori yang telah didapat dalam praktek yang sebenarnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang pengaruh kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI, TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU KERANGKA FIKIR DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut **Andriani** dalam **Waluyo (2013:2)** Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara yang sebesar

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak bagi masyarakat merupakan beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung ketika mereka membayar pajak.

Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak, adalah sebagai berikut **Waluyo, (2013:3)** :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter , yaitu mengatur.

Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007 menyatakan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pajak adalah suatu kontibusi wajib kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Mardiasmo (2016: 1)** Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya memaksa.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dengan demikian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa definisi pajak adalah suatu iuran dari rakyat kepada negara, yang berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa, dan dipungut oleh negara tanpa adanya kontraprestasi (timbang balik) langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam menjalankan suatu negara.

### 2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut **Mardiasmo (2016:5)** pajak memiliki lima macam fungsi, yaitu:

#### 1. Fungsi *budgetair*

Pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.

#### 2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi.

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

#### 3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

#### 4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja , yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 5. Fungsi demokrasi

Merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan.

### **2.1.1.2 Jenis Pajak**

Menurut **Siti Resmi (2014: 7-8)** Pajak dikelompokan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya :

#### **1. Menurut Golongannya**

##### 1. Pajak langsung

pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban yang bersangkutan.

Contoh: Pajak penghasilan.

##### 2. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Dalam pengertian administratif pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang, atau jasa. Contoh : Pajak pertambahan nilai, bea materai, bea balik nama.

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam srti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.

Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung Pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

## **2. Menurut Sifatnya**

### **1. Pajak Subjektif**

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul.

Contoh : Pajak Penghasilan

## 2. Pajak objektif

Pajak objektif pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berdomisili di Indonesia atau tidak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

### 1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

- a. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Undang-Undang PPN dan PPnBM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1985 yang menggantikan UU Pajak Penjualan 1951.

b. Pajak Penghasilan.

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mulai diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 1986 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

d. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Undang-Undang Bea Materai berlaku mulai 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-Undang Bea Materai yang lama (aturan bea Materai Tahun 1921).



## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

### 1. Pajak Propinsi

Pajak-Pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

## 2. Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu :

- a) Pajak Hotel, menurut peraturan daerah No. 26 tentang Pajak Hotel yaitu “pajak hotel di sebut pajak daerah pungutan daerah atas penyelenggaraan hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan di pungut bayaran, termasuk bangunan yang lainnya yang mengatur,di kelola dan dimiliki oleh pihak yang sama kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel, sedangkan subjek pajak hotel

adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel.

- b) Pajak Restoran, menurut Peraturan Daerah No. 29 tentang Pajak Restoran (yaitu pajak restoran yang di sebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Objek pajak restoran yaitu setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran sedangkan subjek pajak restoran terdiri dari orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, wajib pajak rastoran yaitu pengusaha restoran dan tarif pajak di tetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- c) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan sedangkan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

### **2.1.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak**

#### **1. Stelsel Pajak**

Menurut **Waluyo (2013: 16-17)** dalam pemungutan pajak khususnya Pajak Penghasilan dikenal 3 macam stelsel pajak, adalah sebagai berikut:

##### **1. Stelsel Nyata**

Menurut stelsel nyata pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Dengan demikian, besarnya pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak, karena penghasilan riil baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir.

##### **2. Stelsel Fiktif**

Menurut stelsel fiktif yang juga disebut stelsel anggapan, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan (fiksi). Anggapan yang dimaksud disini dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung peraturan perpajakan yang berlaku. Anggapan tersebut dapat berupa anggaran pendapat tahun berjalan atau diasumsikan penghasilan tahun pajak berjalan sama dengan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu.

##### **3. Stelsel Campuran**

Stelsel Campuran, merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel fiktif. Pada awal tahun pajak atau periode pajak perhitungan

pajak menggunakan stelsel fiktif dan pada akhir tahun pajak atau akhir periode dihitung kembali berdasarkan stelsel nyata.

## **2. Asas Pemungutan Pajak**

Menurut **Mardiasmo (2016: 9)**, terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

### **1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)**

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

### **2. Asas Sumber**

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### **3. Asas Kebangsaan**

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

## **3. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut **Susyanti dan Dahlan (2015:4)**, sistem pemungutan pajak di Indonesia ada 3 yaitu:

### **1. *Official Assessment System***

Sistem ini masih digunakan dalam memungut pajak daerah. Dalam system ini yang menentukan besarnya pajak adalah aparat pajak (fiscus), wajib pajak pasif, keberhasilan system ini sangat tergantung dari keaktifan dan profesionalisme aparat (fiscus).

## 2. *Self Assessment System*

System ini digunakan dalam memungut pajak pusat atau pajak negara arti dari system ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. System ini tecermin dalam perhitungan PPh di akhir tahun. Keberhasilan system ini sangat tergantung dari kesadaran masyarakat, kejelasan UU, dan professionalism aparat. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

## 3. *With Holding System*

System ini masih digunakan dalam pemungutan pajak pusat maupun pajak daerah. Pengertian sistim ini adalah dalam pemungutan dan penyetoran pajak pemerintah (fiscus) melibatkan wajib pajak yang lain.

#### **2.1.1.4 Timbulnya Utang Pajak**

Menurut **Resmi (2014: 12)** saat timbulnya utang pajak mempunyai peranan yang sangat penting karena berkaitan dengan:

1. Pembayaran pajak
2. Memasukan surat keberatan
3. Menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa
4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Dan lain-lain.
5. Menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya.

#### **2.1.1.5 Hapusnya Utang Pajak**

Menurut **Waluyo (2013: 19)** Adapun hapusnya utang pajak disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran  
Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.
2. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasi dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran.

### 3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak. Daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Suarat Paksa.

### 4. Pembebasan

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak dapat diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi.

### 5. Penghapusan



Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena wajib pajak, misalnya: keadaan keuangan wajib pajak.

#### **2.1.1.6 Sistem Perpajakan**

Menurut **Diana (2013:23)** system perpajakan setiap Negara terdiri dari 3 unsur yakni kebijakan perpajakan (*tax policy*), undang-undang perpajakan (*tax law*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*). Ketiga unsur perpajakan tersebut tergantung satu sama lain untuk mencapai suatu system perpajakan yang sehat menyeluruh, diperlukan kesadaran yang lebih tinggi atas ketergantungan tersebut. System perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau bagaimana cara mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dalam mengalir ke kas Negara.

#### **2.1.1.7 Istilah-Istilah Undang-Undang Dalam Perpajakan**

Menurut **Agus Sambodo (2014:15-18)** Pasal 1 dalam undang-undang perpajakan nomor 28 tahun 2007 menguraikan tentang istilah-istilah yang harus dipahami dalam mempelajari pajak yaitu:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keputusan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak mendorong pajak dan memungut pajak yang mempunyai hak kewajiban dan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pajak.
3. Badan adalah sekumpulan orang modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer dan lainnya.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengekspor barang atau usaha perdagangan memanfaatkan barang yang tidak berwujud diluar daerah pabean.
5. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yg dipergunakan sebagai tanda penegenal diri wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajibannya.
7. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung menyetor dan melaporkan pajak yg terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.

8. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
9. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.
10. Pajak yang terutang pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak atau dalam tahun pajak menurut peraturan undang-undang pajak.
11. Surat pemberitahuan adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk menggunakan penghitungan pajak atau pelaporan pajak oleh wajib pajak atau bukan objek pajak asset dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.
13. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
14. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara tempat melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan nihil.

16. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak jumlah ketetapan pajak pokok pajak, besarnya administrasi dan jumlah yg masih harus dibayar.
17. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karna jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya tidak terutang.
19. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi pajak administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat paksa adalah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan pajak.
22. Kredit pajak adalah untuk pajak prtambahan nilai adalah pajak masukan yang dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan atau setelah dikunrangi dengan pajak yg telah dikompensasikan yang dikurangkan dari pajak yang terutang.

23. Kredit pajak untuk pajak penghasilan adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak karena pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar, ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut, ditambah dengan pajak atas penghasilan yang dibayar atau dikurangkan dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pajak yang dikurangkan dari pajak yang terutang.
24. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.
25. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.1.2 Manajemen Pajak Perusahaan**

### **2.1.2.1 Sejarah Manajemen Pajak**

Gencarnya pembangunan di Indonesia dewasa ini harus didukung oleh pembiayaan yang memadai. Pembangunan di Indonesia didukung oleh sumber pembiayaan yang salah satunya bersumber dari sektor perpajakan, namun di sisi lain bagi para pengusaha pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan,

sehingga mereka cenderung menghindari kewajiban perpajakannya. Pengelolaan kewajiban perpajakan yang tidak baik dapat memberikan dampak yang sangat merugikan bagi perusahaan, karena tidak sedikit perusahaan yang terbongkar kecurangannya oleh fiskus dalam mengelola kewajiban perpajakannya, sehingga akan menyebabkan timbulnya sanksi perpajakan yang dapat merugikan perusahaan. Manajemen pajak adalah suatu strategi yang dilakukan perusahaan sebagai upaya untuk efisiensi pajak penghasilan dengan cara memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar sesuai undang-undang .

Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang tujuannya untuk menekan serendah mungkin kewajiban pajaknya. **Khairunnisa R (2014:67)** menyatakan bahwa manajemen pajak adalah manajemen pajak adalah strategi yang dilakukan perusahaan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak agar beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin namun tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun rumus yang digunakan dalam manajemen pajak perusahaan yaitu :

$$ETR(it) = \frac{\text{Beban Pajak } i,t}{\text{Laba Sebelum Pajak } i,t}$$

Manajer wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (tax management) yang merupakan bagian dari manajemen

keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Menurut **Meiliza Celara Angela Putri (2017:297)** Manajemen pajak adalah kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui tiga fungsi, yaitu:

1. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi tindakan dalam penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak lebih menekankan untuk meminimumkan kewajiban 13 pajaknya.

2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Pada tahap perencanaan pajak apabila sudah diketahui faktor – faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah selanjutnya yaitu mengimplementasikannya baik secara formal maupun material.

3. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan telah memenuhi

persyaratan formal maupun material. Dalam pengendalian pajak yang penting adalah pengecekan pembayaran pajak.

#### **2.1.2.2 Pengertian Manajemen Pajak Perusahaan**

Menurut **Chairil Anwar Pohan (2013:9-10)** manajemen pajak merupakan bagian integral dari perencanaan strategi perusahaan yang seharusnya dimulai sebelum suatu usaha dimulai. Pelaksanaan manajemen pajak harus ekonomis, efisien dan efektif.

Manajemen pajak adalah usaha yang menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi masyarakat.

#### **2.1.2.3 Fungsi Manajemen Pajak**

Menurut **Chairil Anwar Pohan (2013:13-15)** ada beberapa fungsi manajemen pajak yaitu sebagai berikut :

1. *tax planning*

*tax planning* adalah usaha yang mencakup perencanaan perpajakan agar pajak yang dibayar benar-benar efisien.

2. *tax administration*



*tax administration* adalah mencakup usaha-usaha untuk memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dengan cara menghitung pajak secara benar sesuai dengan ketentuan perpajakan, kepatuhan dalam membayar dan tepat waktu sesuai deadline pembayaran pelaporan pajak yang telah ditetapkan.

3. *Tax audit*

Tax audit adalah mencakup strategi dalam menangani pemeriksaan pajak, maupun strategi dalam mengajukan surat keberatan atau surat banding.

4. *Others tax matters*

*Other tax matters* adalah masalah yang mencakup fungsi-fungsi lain yang berkaitan dengan perpajakan seperti mengkomunikasikan ketentuan-ketentuan system dan prosedur perpajakan atau pihak bagian-bagian lain dalam perusahaan.

#### **2.1.2.4 Tujuan Manajemen Pajak**

**Suandy (2011:12)** menyatakan tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan dengan benar segala ketentuan perpajakan dan upaya efisiensi pajak penghasilan untuk dapat mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak, yang meliputi tax planning, tax implementation, dan tax control.

Perencanaan pajak adalah langkah awal yang dilakukan dalam upaya efisiensi pajak penghasilan dengan cara menyusun suatu strategi penghematan pajak. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan adalah meneliti dan mengumpulkan ketentuan peraturan perpajakan agar dapat diketahui jenis upaya efisiensi pajak penghasilan yang akan dilakukan kedepannya.

Setelah melakukan perencanaan pajak dan telah mengetahui faktor-faktor yang akan dimanfaatkan untuk melakukan penghematan pajak, maka langkah kedua yang harus dilakukan adalah mengimplementasikannya.

**Suandy (2011:14)** menyatakan, tujuan manajemen pajak dapat dicapai apabila perusahaan menguasai dan melaksanakan ada dua hal, yaitu memahami ketentuan perpajakan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

#### **2.1.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Perusahaan**

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pajak yaitu kompensasi manajemen, kepemilikan institusional, dan reputasi auditor. Dengan pemberian kompensasi manajemen yang tepat, diharapkan akan memacu manajemen untuk mengambil strategi paling ampuh dalam pelaksanaan manajemen pajak.

### **2.1.3 Kompensasi Manajemen**

#### **2.1.3.1 Sejarah Kompensasi Manajemen**

Kompensasi manajemen muncul untuk mengatasi masalah akibat konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan manajemen. Konflik ini muncul karena adanya asimetri informasi yang diterima oleh pemilik atas informasi yang dimiliki manajemen mengenai perusahaan.

Dengan dipicu adanya kepentingan ekonomi, konflik ini dapat memicu tindakan oportunistik manajemen. Manajemen tidak akan bertindak untuk kepentingan pemegang saham jika tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Untuk menjembatani hal tersebut, pemilik pada umumnya mengeluarkan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen.

Pemberian kompensasi yang tepat terhadap manajemen akan membuat kinerja perusahaan akan meningkat. Kinerja perusahaan selama ini masih diukur dengan kinerja laba. Kinerja laba salah satunya dipengaruhi oleh efisiensi pembayaran pajak perusahaan.

Semakin efisien pembayaran pajak perusahaan maka makin tinggi margin laba yang dihasilkan. Dengan adanya kompensasi terhadap manajemen diharapkan efisiensi pembayaran pajak perusahaan makin meningkat dan tujuan meningkatkan kinerja perusahaan dapat tercapai.

### 2.1.3.2 Pengertian Kompensasi Manajemen

Menurut **Kadarisman (2014:1-2)** kompensasi adalah faktor penting untuk mempertahankan karyawan dalam organisasi/perusahaan. Hal tersebut karena suka atau tidak suka, disadari atau tidak, uang yang merupakan bagian dari bentuk kompensasi adalah faktor penting dalam kehidupan yang dapat meningkatkan motivasi. Meskipun hal itu sulit untuk bisa memuaskan manusia. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam uraian selanjutnya, perlu diberikan pemahaman secara tuntas terhadap pengertian Manajemen Kompensasi serta filosofinya, baik untuk kalangan sektor publik maupun swasta.

Adapun rumus dari Kompensasi Manajemen yaitu :

<i>Ln kompensasi diterima eksekutif selama setahun</i>
--

Menurut **Yussy Santoso Dan Ronni R.Masman (2016:3)** kompensasi manajemen adalah sebuah proses pengelolaan pemberian penghargaan (*rewards*) biasanya dengan mempertimbangkan factor bobot pekerjaan (*job size*), kinerja (*performance*) dan masa kerja (*length of service*). Juga menggambarkan cara pekerja dibayar, diakui dan dihargai yang dipergunakan oleh organisasi untuk mengirim pesannya untuk para pekerja.

Kompensasi berdasarkan sifatnya ada dua macam yaitu bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Tentunya mudah digolongkan bahwa yang sifatnya ekstrinsik biasanya terkait dengan pembayaran sedangkan kompensasi intrinsik terkait dengan lingkungan kerja, tipe pekerjaan dan tantangan dalam pekerjaan. Gabungan antara kompensasi yang bersifat ekstrinsik dan intrinsik merupakan keseluruhan struktur penghargaan.

### **2.1.3.3 Tujuan Kompensasi Manajemen**

Menurut **Malayu S.P Hasibuan (2013:121)** tujuan kompensasi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Ikatan Kerja Sama, dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Kepuasan kerja, dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status social, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya.
3. Pengadaan efektif, jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang *qualifield* untuk perusahaan akan lebih mudah.

4. Motivasi, jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya.
5. Stabilitas karyawan, dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif maka stabilitas karyawan akan lebih terjamin karena turnover relatif kecil.
6. Disiplin, dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan semakin baik, mereka akan menyadari serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
7. Pengaruh serikat buruh, dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya.
8. Pengaruh pemerintah, jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan.

Menurut **Yussy Santoso Dan Ronni R.Masman (2016:25)** Pemberian kompensasi adalah sebagai berikut:

1. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi pada karyawan yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja lebih baik.
  1. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif.  
Dengan pemberian kompensasi kepada karyawan mengandung

implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan dengan seefisien dan seefektif mungkin.

2. Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

#### **2.1.3.4 Jenis-Jenis Kompensasi**

terdiri dari kompensasi langsung dan tidak langsung, kompensasi langsung :

1. Gaji Menurut **Rivai** dalam **Kadarisman (2013:316)** gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai pegawai yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan.
2. Upah Lembur Lembur atau sering disebut dengan overtime merupakan istilah yang dipakai untuk bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan Pemerintah di negara bersangkutan. Kerja lembur merupakan pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja resmi dan jam kerja resmi, kecuali yang mendapat premi seperti tercantum dalam Pasal 20 Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Lembur atau overtime perlu direncanakan dengan baik sehingga tidak merugikan perusahaan, hal ini dikarenakan Biaya Lembur pasti lebih tinggi dari biaya waktu kerja biasanya. Upah kerja lembur adalah upah yang dibayarkan atas pekerjaan yang dilaksanakan

pada waktu kerja lembur. Oleh karena itu, pengetahuan tentang cara menghitung lembur menjadi sangat penting untuk membantu manajemen dalam merencanakan jadwal dan kapasitas produksi yang sesuai dengan anggaran operasional produksi dan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan dan karyawan.

#### **2.1.4 Kepemilikan Institutional**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kepemilikan Institutional**

Kepemilikan institusional memiliki pandangan yang sama dengan manajemen mengenai pajak perusahaan, yang mana kepemilikan institusional berupaya mempengaruhi manajemen untuk meminimalisasi beban pajak, karena beban pajak merupakan beban yang mengurangi laba setelah pajak perusahaan.

Investor institusional menuntut pendapatan setelah pajak untuk distribusi keuntungan yang lebih tinggi, sehingga mereka mengharapkan manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang mengakibatkan beban pajak lebih rendah.

Investor institusional tentu menginginkan dividen yang besar. Apabila pembayaran pajak tinggi tentu akan mengurangi jumlah dividen yang dibayarkan ke mereka. Disini, peneliti ingin melihat apakah kepemilikan institusional akan mendorong terjadinya manajemen pajak yang dilakukan oleh manajer.



Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan jumlah saham perusahaan oleh lembaga non bank dimana lembaga tersebut mengelola nama atas nama orang lain. Lembaga ini dapat berupa, antara lain sebagai berikut :

1. Perusahaan reksa dana
2. Perusahaan dana pension
3. Perusahaan asuransi
4. Perusahaan investasi
5. Yayasan swasta, wakaf atau badan besar lainnya yang mengelola dana atas nama orang lain.

Menurut **Ayuningtias** Dalam **Hery (2013:41)** kepemilikan institusional merupakan persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh badan hukum atau institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, dana pension, raksadana, bank dan institusi lainnya.

Sedangkan Menurut **Tarjo** dalam **Rina Susanti (2014:7)** Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional

sebagai agen pengawas ditekan melalui investasimereka yang cukup besar dalam pasar modal. Dengan kepemilikan institusional yang tinggi maka akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga menghalangi perilaku *opportunistic* manajer.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain :

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

Dengan kata lain, kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun atau perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung pada akhir tahun.

Menurut **Tamba** dalam **Pratiwi, Kristanti, Dan Mahardika (2016:3192)** kepemilikan institusional dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{jumlah saham oleh pihak institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100$$

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa defenisi tersebut diatas yaitu kepemilikan institusional merupakan proporsi perbandingan jumlah pemegang saham oleh pihak institusi dengan keseluruhan jumlah saham yang beredar.

### 2.1.5 Tata Kelola Perusahaan

Istilah tata kelola perusahaan pada awalnya lebih menekankan pada perlindungan kepada investor (pemegang saham). Tata kelola perusahaan diartikan sebagai suatu mekanisme yang dirancang dan dirumuskan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar kepentingan dan tujuan pemegang saham terlindungi dan tercapai perkembangan baru tentang konsep tata kelola perusahaan memiliki cakupan yang lebih luas. Defenisi baru tentang tata kelola perusahaan menekankan pada pendekatan yang berorientasi pemangku kepentingan.

Perkembangan kelola perusahaan berangkat dari teori keagenan (agency theory) yang dikembangkan oleh **Jensen** dan **Meckling** pada tahun **1976**. Teori tersebut mendasarkan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya.

Memandang manajemen sebagai “agents”, manajemen akan bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Adanya pemisahan kepemilikan dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah agency problem terjadi. Agen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan mempunyai lebih banyak informasi

mengenai kapasitas perusahaan, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Di sisi lain, prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen.

### 2.1.5.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Pengertian tata kelola perusahaan dapat ditemukan dalam berbagai penjelasan. Tetapi pada dasarnya tata kelola perusahaan berfokus pada bagaimana cara semua pihak didalam organisasi termasuk *stakeholder* untuk memastikan manajer dan individu lain yang ada dalam organisasi untuk selalu memiliki alat ukur yang jelas atau mengadaptasi mekanisme untuk menjaga ketertarikan dari stakeholders. Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mengukur tata kelola perusahaan itu sendiri yaitu sebagai berikut :

$$DKI = \frac{\sum \text{Komisaris Independent}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

Menurut **Meiliza Celara Angela Putri (2017:297)** tata kelola perusahaan merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan,

pemegang saham, pelanggan, kreditur, dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya

Menurut **Prasetyantoko (2008:5)** corporate governance adalah mekanisme bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan menurut suatu aturan hak dan kuasa tertentu. Ia mengarahkan aksi individu dalam organisasi dan kegiatan rutin tertentu sesuai dengan suatu muara. Muara itu bias berupa menghasilkan laba sebesar-besarnya dan juga etika social.

Menurut **Khairunnisa R (2016:1066)** Manajemen pajak adalah strategi yang dilakukan perusahaan dalam melakukan efisiensi pembayaran pajak agar beban pajak dapat ditekan seminimal mungkin namun tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tata kelola perusahaan bias juga dilihat sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama dengan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Sekarang ini tata kelola perusahaan yang baik lebih dikenal sebagai suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip diantaranya :

1. Keterbukaan ( transparency)
2. Akuntabilitas (accountability)
3. Pertanggung jawaban (responsibility)

4. Independensi (independency)

5. Kewajaran (fairness)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan tata kelola perusahaan adalah suatu system tata kelola perusahaan yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Tata kelola perusahaan pada dasarnya tidak dibutuhkan tidak hanya untuk internal perusahaan tetapi juga untuk pihak eksternal. Hal ini akan berhubungan dengan bagaimana pihak eksternal memperoleh informasi dan jaminan terbaik mengenai perusahaan untuk masa yang akan datang.

Tata kelola perusahaan memiliki beberapa model, yaitu :

1. *Principal-Agen Model*

Diman korporasi dikelola untuk memberikan win-win solution bagi pemegang saham sebagai pemilik disatu pihak dan manger sebagai agen dilain pihak.

2. *The Myopic Market Model*

Masih memfokuskan perhatian pada kepentingan pemegang saham dan manajer,dimana sentiment pasar lebih banyak dipengaruhi oleh factor-faktor lain diluar tata kelola perusahaan.

3. *Stakeholders Model*

Model ini memberikan perhatian kepada kepentingan pihak yang terkait dengan korporasi secara luas.

#### **2.1.5.2 Tujuan Tata Kelola Perusahaan**

Tata kelola perusahaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kewajiban pemegang saham
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
4. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus dan manajemen perusahaan
5. Meningkatkan mutu hubungan dengan manajemen senior perusahaan.

#### **2.1.5.3 Manfaat Tata Kelola Perusahaan**

Menurut **Prasetyantoko (2008:10)** Manfaat tata kelola perusahaan diantaranya adalah:

1. Lebih mudah untuk meningkatkan modal
2. Cost of capital yang lebih rendah
3. Peningkatan kinerja bisnis dan kinerja ekonomis
4. Dampak yang baik pada harga saham.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. **Khairunnisa R (2014)** dengan judul Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). analisis yg digunakan adalah regresi linear sederhana dan regresi berganda. Dengan hasil penelitian kompensasi manajemen masing-masing secara persial berpengaruh terhadap kepemilikan institutional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2013) Secara simultan berpengaruh terhadap kepemilikan institutional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2013).
2. **Meiliza Celara Angela Putri (2017)** dengan judul Pengaruh Kompensasi Manajemen, Corporate Governance, Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak. analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan hasil penelitian kompensasi manajemen masing-



masing secara persial berpengaruh positif terhadap kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

3. **Zulva Yuniati Dan Elva Nuraina (2017)** dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bei 2011-2015. analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan hasil penelitian Kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap manajemen pajak.
4. **Novriansyah Zulkarnaen (2015)** dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013). analisi yang digunakan adalah regresi berganda dengan hasil penelitian Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa komsaris independen,kompensasi manajemen eksekutif, investor institusional berpengaruh secara bersama sama terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak.
5. **Gandi Wahyu Maulana Zulma, Dwi Martani (2015)** dengan judul Pengaruh kompensasi manajemen berbasis saham terhadap manajemen pajak perusahaan dengan mempertimbangkan fungsi

pengawasan komite audit. analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hasil penelitian mengatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

6. **Hendra Putra Irawan (2012)** dengan judul Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bukti yang kuat atas hubungan mekanisme corporate governance, termasuk paket kompensasi direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.
7. **Yenni Carolina (2017)** dengan judul pengaruh Good Corporate Governance dan Tax Management (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015). analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.
8. **Natrion (2017)** dengan judul Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak. analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi

dewan komisaris serta dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.

9. **Tazkia Karin Manurung, Astrie Krisnawati (2018)** dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016). analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif regresi data panel dengan hasil penelitian menunjukkan yaitu secara simultan dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Secara parsial dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.
10. **Fahreza (2014)** dengan judul Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Di Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, kompensasi manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi the book tax gap.

Sedangkan kompensasi manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi GAAP effective tax rate.

11. **Silvia Ratih Puspita, Puji Harto (2014)** dengan judul Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan hasil penelitian Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.
12. **Maya Indah Pratiwi (2016)** dengan judul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan. analisis yang digunakan adalah metode regresi linear berganda dengan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

13. **Putu Rista Diantari (2016)** dengan judul Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. Analisa yang digunakan adalah regresi linear berganda. Dengan hasil penelitian bahwa menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
14. **Charles cao, lubomir petrsek (2014)** dengan judul Liquidity risk and institutional ownership. analisis yang digunakan adalah metode data panel. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa hasil empiris mendukung hipotesa bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi risiko likuiditas saham berbeda dari kepemilikan individu. saham yang dimiliki oleh institusi rata-rata memiliki risiko liquidity lebih rendah dari pada saham.
15. **R.Greg Bell, Igor Filatotchev And Ruth V. Aguilera (2014)** dengan judul corporate governance and investors perception of foreign ipo value : an institutional perspective. analisis yang digunakan adalah metode linear regresi berganda. Dengan hasil penelitian ebih dari faktor institusional terkait dengan tingkat yang sama dari penilaian investor terhadap perusahaan. Selain itu, faktor-faktor institusional

terkait dengan kekuatan perlindungan pemegang saham minoritas di suatu negara. sebelumnya merupakan kondisi batas yang memengaruhi jumlah mekanisme pemerintahan yang diperlukan untuk mencapai persepsi nilai yang tinggi di antara para investor AS.

**Tabel 2.1**

**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1	Khairunnisa R (2014)	Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	Dependen: Manajemen pajak perusahaan.  Independen: Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional, Reputasi Auditor.	Analisis regresi linier berganda.	Dengan hasil penelitian kompensasi manajemen, masing-masing secara persial berpengaruh terhadap kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.	Persamaan: Menggunakan alat analisis regresi linear berganda. Menggunakan variabel penelitian yang sama yaitu kompensasi manajemen, kepemilikan institusional.  Perbedaan: variabel berbeda, dan periode peneltian berbeda.
2.	Meiliza Celara Angela Putri (2017)	Pengaruh Kompensasi Manajemen, Corporate Governance,	Dependen: Manajemen pajak perusahaan	Regresi liniear berganda.	kompensasi manajemen masing-masing secara persial berpengaruh	Persamaan: variabel, alat analisis regresi linier berganda. Menggunakan

		Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak	Independen: kompensasi manajemen, corporate governance, reoutasi auditor		terhadap manajemen pajak.	variable penelitian kompensasi manajemen.  Perbedaan :  Objek peneltian, tahun penelitian, periode penelitian
3.	Zulva Yuniati Dan Elva Nuraina (2017)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Manufaktur Di Bei 2011-2015	Dependen: Manajemen pajak  Independen: corporate governance	Regresi linier berganda.	Kepemilikan publik, dewan direksi, dan komite audit secara simultan (bersama-sama)berpengaruh terhadap manajemen pajak.	Persamaan: Manajemen pajak.  Perbedaan: Objek peneltian, tahun penelitian, periode penelitian
4.	Novriansyah Zulkarnaen (2015)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Kuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013)	Dependent : Terhadap manajemen pajak perusahaan  Independent : Good corporate governance.	Analisis regresi linier berganda	Berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa komsaris independen,kompensasi manajemen eksekutif, investor institusional berpengaruh secara bersama sama terhadap manajemen pajak dengan indikator tarif pajak.	Persamaan: Menggunakan alat analisis regresi linier berganda, menggunakan variabel penelitian manajemen pajak  Perbedaan : tahun penelitian, periode penelitian.
5.	Gandi Wahyu Maulana Zulma, Dwi	Pengaruh kompensasi manajemen berbasis	Dependent : Manajemen pajak	Analisis regresi linear	dengan hasil penelitian mengatakan bahwa	Persamaan: Menggunakan alat analisis

	Martani (2015)	saham terhadap manajemen pajak perusahaan dengan mempertimbangkan fungsi pengawasan komite audit	perusahaan. Independent : Kompensasi manajemen.	berganda	kompensasi manajemen kompensasi manajemen berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.	regresi linier berganda, menggunakan variabel penelitian manajemen pajak perusahaan.  Perbedaan : tahun penelitian, periode penelitian.
6.	Hendra Putra Irawan (2012)	Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan	Dependent : manajemen pajak perusahaan. Independent : Kompensasi manajemen, Corporate governance.	Regresi linear berganda	hasil penelitian menunjukkan bukti yang kuat atas hubungan mekanisme corporate governance, termasuk paket kompensasi direksi terhadap manajemen pajak perusahaan.	Persamaan: Menggunakan alat analisis regresi linier berganda, menggunakan variabel penelitian Kompensasi manajemen, corporate governance dan manajemen pajak perusahaan.  Perbedaan : tahun penelitian, periode penelitian.
7.	Yenni Carolina (2017)	pengaruh Good Corporate Governance dan Tax Management (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan	Dependent : Tax management Independent : good corporate governance.	regresi linear berganda	Dengan hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.	Persamaan : Menggunakan variable penelitian corporate governance, manajemen pajak.  Perbedaan : tahun



		yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015)				penelitian, periode penelitian.
8.	Natrion (2017)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak	Dependent : Manajemen pajak  Independent : Corporate governance	regresi linear berganda	dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi komisaris serta dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak.	Persamaan :  Menggunakan variable penelitian corporate governance, manajemen pajak.  Perbedaan :  Tahun penelitian dan periode penelitian.
9.	Tazkia Karin Manurung, Astrie Krisnawati (2018)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Perkebunan yang terdaftar di BEI Periode 2012-2016)	Dependent : Manajemen pajak.  Independent : Good corporate governance.	metode analisis kuantitatif regresi data panel.	dengan hasil penelitian menunjukkan yaitu secara simultan dewan komisaris, komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Secara parsial dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan dewan	Persamaan :  Menggunakan variable corporate governance dan manajemen pajak.  Perbedaan :  Tahun penelitian dan periode penelitian.

					Sedangkan dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.	
10.	Fahreza (2014)	Pengaruh Kompensasi Manajemen Dan Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Pajak Di Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	Dependent : Manajemen pajak perusahaan  Independent : kompensasi manajemen, reputasi auditor	Regresi linear berganda	dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, kompensasi manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan menggunakan proksi the book tax gap. Sedangkan kompensasi manajemen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak yang diukur menggunakan proksi GAAP effective tax rate.	Persamaan :  Menggunakan variable kompensasi manajemen dan manajemen pajak.  Perbedaan :  Tahun penelitian dan periode penelitian.

11	Silvia Ratih Puspita, Puji Harto (2014)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	Dependent : Penghindaran pajak  Independent : Tata kelola perusahaan	Regresi linear berganda	dengan hasil penelitian Latar belakang keahlian akuntansi atau keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peran komite audit tidak efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.	Persamaan : Menggunakan variable Tata kelola Perusahaan  Perbedaan : Tahun penelitian dan periode penelitian.
12	Maya Indah Pratiwi (2016)	Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan	Dependent : Nilai Perusahaan  Independent : Kepemilikan institusional	Regresi linear berganda	Dengan penelitian bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap nilai	Persamaan : Menggunakan kepemilikan institusional  Perbedaan : Tahun penelitian dan periode penelitian.

					perusahaan. Sedangkan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.	
13.	Putu Rista Diantari (2016)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	Dependent : Tax avoidance  Independent : Komite audit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan	Regresi linear berganda	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap tax avoidance.	Persamaan : Menggunakan kepemilikan institusional  Perbedaan : Tahun penelitian dan periode penelitian.

14.	Charles cao, lubomir petrsek (2014)	Liquidity risk and institutional ownership.	Independent :  Liquidity risk and institutional ownership.	Regresi data panel	bahwa hasil empiris mendukung hipotesa bahwa kepemilikan institusional mempengaruhi risiko likuiditas saham berbeda dari kepemilikan individu. saham yang dimiliki oleh institusi rata-rata memiliki risiko liquidity lebih rendah dari pada saham.	Persamaan :  Menggunakan kepemilikan institusional  Perbedaan :  Tahun penelitian dan periode penelitian.
15	R.Greg Bell, Igor Filatotchev And Ruth V. Aguilera (2014)	corporate governance and investors perception of foreign ipo value : an institutional perspective	Independent :  Corporate governance and investors perception of foreign ipo value : an institutional perspective	Regresi linear berganda	Dengan hasil penelitian ebih dari faktor institusional terkait dengan tingkat yang sama dari penilaian investor terhadap perusahaan. Selain itu, faktor-faktor institusional terkait dengan kekuatan perlindungan pemegang saham minoritas di suatu negara.	Persamaan :  Menggunakan corporate governance  Perbedaan :  Tahun penelitian dan periode penelitian.

## **2.3 Pengembangan Hipotesis**

Penelitian ini memiliki tentang kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar dibursa efek indonesia tahun 2013-2017).

### **2.2.1 Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional Dan Tata Kelola Perusahaan secara bersama-sama Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.**

Pada hipotesis ini belum ada penelitian terdahulu tentang Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan secara bersama-sama terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. apakah berpengaruh positif atau negatif, maka penelitian ini dapat dibuat hipotesis.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 = Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang kosumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **2.2.2 Pengaruh Kompensasi Manajemen Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

Menurut **Meiliza Celara Angela Putri (2017)** kompensasi manajemen masing-masing secara persial berpengaruh terhadap manajemen pajak. Menurut **Fahreza (2014)** kompensasi manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen pajak

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2 = kompensasi manajemen mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sector industry barang kosumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **2.2.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

Menurut **Khairunnisa R (2014)** Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3 = kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang kosumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

### **2.2.3 Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan**

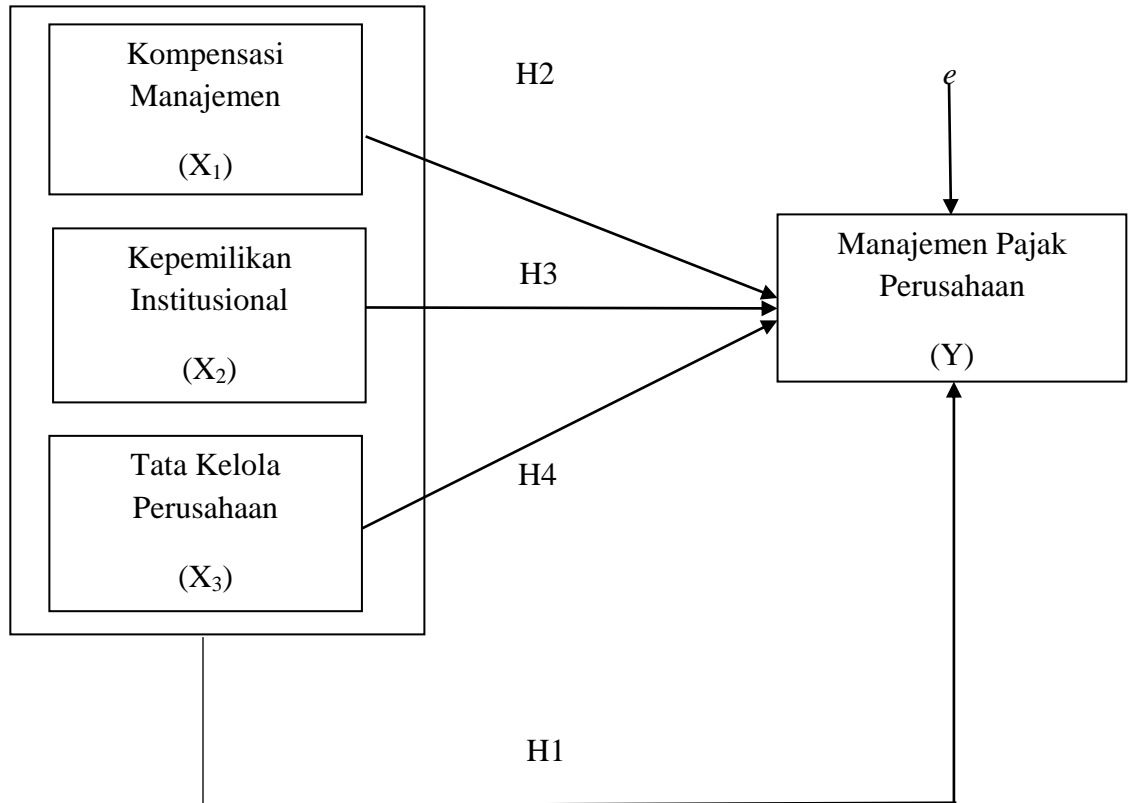
Menurut **Natrion (2017)** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, dan kompensasi dewan komisaris serta dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. **Tazkia Karin Manurung (2018)** Secara parsial dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak. Sedangkan dewan komisaris independen dan kompensasi dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4 = Tata kelola perusahaan mempunyai pengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.



## 2.4 Kerangka Fikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

#### **3.2 Desain Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian yang diteliti dan dirumuskan, maka penelitian yang penulis buat dapat digolongkan pada penelitian yang bersifat deskriptif. Yang menggambarkan tentang bagaimana pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Pajak perusahaan sector industry barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017. Tempat pengambilan data adalah pada Bursa Efek Indonesia (Galeri BEI UPI YPTK padang). Data diambil dari beberapa website seperti [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website perusahaan yang menjadi sampel.

### 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Penelitian

#### 3.3.1 Variabel Penelitian

Variable yang akan dibahas meliputi :

1. Variable bebas (*Independent*) :
  - a. Kompensasi Manajemen (X1)
  - b. Kepemilikan Institusional (X2)
  - c. Tata Kelola Perusahaan (X3)
2. Variable terikat (*dependent*)
  - a. Manajemen Pajak Perusahaan (Y)

#### 3.3.2 Variabel dan Defenisi Operasional

Ada dua variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu variable dependen dan variable independen sebagai berikut:

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (**Sugiyono, 2016**). Dalam penelitian ini Variabel yang dipakai terdiri dari dua variabel, yaitu variabel Indenden atau bebas (X) dan variabel dependent atau terikat (Y), yaitu:

1. Variabel dependen

Variabel ini sering disebut sebagai variable respon atau output atau variable terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang

menjadi akibat ,karena adanya variable bebas. Antara variable independen dan variable dependen masing-masing tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan.

a. Manajemen Pajak Perusahaan (Y)

Variabel dependen dalam peneitian ini ialah manajemen pajak perusahaan (Y), Dalam penelitian ini cara mengukur manajemen pajak menggunakan pendekatan ETR (Effective Tax Rate). Effective Tax Rate (ETR) didefinisikan sebagai rasio (dalam persentase) dari pajak yang dibayarkan perusahaan berdasarkan total pendapatan sebelum pajak penghasilan akuntansi sehingga dapat mengetahui seberapa besar persentase perubahan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Manajemen pajak dapat diukur:

$$ETR(it) = \frac{\text{Beban Pajak } i, t}{\text{Laba Sebelum Pajak } i, t}$$

2. Variabel independen

Variable ini sering disebut sebagai variable stimulus, predictor, atau *antecedent*. Independent adalah variable yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat).

a. Kompensasi Manajemen (X1)

Kompensasi manajemen merupakan biaya sebagai kompensasi terhadap manajemen agar manajemen dapat lebih transparan dan meningkatkan kinerja manajemen dan otomatis meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut :

$$\text{Ln kompensasi diterima eksekutif selama setahun}$$

b. Kepemilikan institusional (X2)

kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah , bank, perusahaan asuransi, dan investor luar negeri, kecuali kepemilikan individual investor. Variabel Independen kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$INST = \frac{\text{Proporsi Saham Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}} \times 100 \%$$

c. Tata kelola perusahaan (X3)

Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

$$DKI = \frac{\sum \text{Komisaris Independent}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$$

**Tabel 3.1**

**Operasional Dan Pengukuran Table**

No	Variable	Jenis variable	Indikator	Skala pengukuran
1	Manajemen pajak perusahaan	Dependen	$ETR(it) = \frac{\text{Beban Pajak } i,t}{\text{Laba Sebelum Pajak } i,t}$	Rasio
2	Kompensasi manajemen	Independen	<i>Ln kompensasi diterima eksekutif selama setahun</i>	Rasio
3	Kepemilikan institusional	Independen	$INST = \frac{\text{proporsi saham dimiliki institusi}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$	Rasio
4	Tata kelola perusahaan	Independen	$DKI = \frac{\sum \text{Komisaris Independent}}{\sum \text{Anggota Dewan Komisaris}}$	Rasio

### **3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1 Sumber Data**

Data yang ada di dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dimana data sekunder adalah data peneliti yang diperoleh berdasarkan atas keterangan pihak lain (Masngudi dan salim, 2013:18). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

#### **3.4.2 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Dokumentasi

Yaitu penelitian melakukan dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut yaitu laporan tahunan perusahaan periode tahun 2013-2017. Data yang digunakan merupakan data yang dapat diperoleh dari *Indonesian Capital Directory* dan *annual report* yang didapat melalui pojok galeri Investasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dan dari website Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Alasan menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah karena bursa tersebut terbesar dan dapat mempresentasikan kondisi bisnis di Indonesia.

## 2. Penelitian Perpustakaan

Yaitu penelitian melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dan teori-teori yang dapat digunakan sebagai sarana pembahasan yang diambil dari buku-buku atau karangan ilmiah, jurnal-jurnal serta sumber-sumber lain yang dapat membantu penelitian.

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 populasi

Menurut **Sugiyono (2016:80)** populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek /subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) untuk periode 2013-2017 digunakannya 5 metode ini dengan mempertimbangkannya yaitu:

1. Untuk melihat konsistensi pengaruh masing-masing variable independen terhadap variable dependen.
2. Data pada tahun tersebut termasuk data baru.
3. Sebagai acuan dari periode penelitian terdahulu menjadi acuan penelitian ini.

Populasi yang digunakan oleh penulis adalah perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Sector industry



barang konsumsi terdiri dari 5 sub sector yakni makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik dan keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah tangga.

### 3.5.2 Sampel

Menurut **Sugiyono (2016:80)** Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* adapun kriteria sampel yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan manufaktur yang termasuk sector industry barang konsumsi.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang memiliki laporan keuangan tahunan secara berturut-turut untuk periode 2013-2017.
4. Adanya Data Yang Diperlukan Untuk Menentukan Hasil Menggunakan Rumus.

Dari kriteria diatas perusahaan manufaktur (sector industry barang kosusumsi) yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel dalam penelitian ini:

**Tabel 3.2**

**Kriteria Pengambilan Sampel**

<b>No</b>	<b>Kriteria Pengambilan Sampel</b>	<b>Jumlah perusahaan</b>
1	Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.	164
2	Perusahaan Manufaktur Yang Tidak Termasuk Sector Industry Barang Kosumsi.	(122)
3	Perusahaan manufaktur sektor industri barang kosumsi yang tidak memiliki laporan keuangan tahunan secara berturut-turut untuk periode 2013-2017.	(9)
4	Tidak Adanya Data Yang Diperlukan Untuk Menentukan Hasil Menggunakan Rumus.	(12)
	Jumlah Sampel Perusahaan Yang Memenuhi Kriteria.	21
	Jumlah pengamatan penelitian (21 x 5 tahun)	105

Sumber : [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com)

Berdasarkan kriteria di atas diperoleh jumlah sampel perusahaan sector industry barang konsumsi yang memenuhi kriteria sebanyak 21 perusahaan. Adapun daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.3**

**Daftar Perusahaan Yang Dijadikan Sampel**

<b>No</b>	<b>Kode perusahaan</b>	<b>Nama perusahaan</b>
1	ADES	PT. AngkasaWira International, Tbk
2	AISA	PT. Tiga Pilar sejahtera food, Tbk.
3	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta, Tbk
4	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk
5	CEKA	PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk
6	DLTA	PT. Delta Djakarta, Tbk.
7	DVLA	PT.Darya Varia Laboratoria Tbk
8	GGRM	PT. Gudang Garam, Tbk.
9	HMSP	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
10	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

11	IIKP	PT. Inti Agri Resources Tbk
12	INAF	PT. Indofarma Tbk
13	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
14	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk.
15	ROTI	PT.Nippon Indosari Corpindo Tbk.
16	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk
17	TCID	PT. Mandom Indonesia Tbk.
18	ULTJ	PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk.
19	UNVR	PT. Unilever Indonesia Tbk.
20	WIIM	PT. Wismilak Inti Makmur, Tbk.
21	MBTO	PT. Martina Berto Tbk.

Dua puluh dua perusahaan yang dijadikan sampel tersebut didapat setelah lolos uji seleksi sampel. Dimana 21 perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur sector industry barang kosumsi yang terdaftar BEI tahun 2013-2017, mempublikasikan laporan keuangan dan tahunan lengkap secara berturut-turut di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2017.

## **3.6 Metode Analisis Data**

### **3.6.1 Analisis Deskriptif**

**Sugiyono (2014: 207)** menyatakan bahwa analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran profil data sampel yang meliputi antara lain mean, median, maksimum, minimum, dan deviasi standar.

### **3.6.2 Uji asumsi klasik**

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk memperoleh hasil regresi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dari pengujian tersebut asumsi-asumsi yang harus dipenuhi terdiri atas :

Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik yang bertujuan untuk menentukan ketepatan model. Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas merupakan uji distribusi data yang akan dianalisis, apakah penyeberangannya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan dalam analisis parametrik. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka kita tidak dapat

menggunakan analisis parametrik melainkan menggunakan analisis non-parametrik. Namun, ada solusi lain jika data tidak normal, yaitu dengan menambahkan lebih banyak sampel.

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data yang digunakan dalam model regresi telah terdistribusi normal.

### **3.6.2.2 Uji Multikolonieritas**

Uji Multikolonieritas adalah suatu kondisi dimana terjadi kolerasi atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. dalam analisis regresi, suatu model harus terbebas dari gejala multikolinieritas dan untuk mendeteksi apakah suatu model mengalami gejala multikolinieritas, maka kita dapat melihat pada.

- a. Ketidakkonsistenan antara koefisien regresi yang diperoleh dengan teori yang digunakan. Mislanya, nilai koefisien regresi yang dihasilkan dari perhitungan menghasilkan nilai negatif, sedangkan teori yang digunakan menyatakan bahwa koefisien regresi bernilai positif.
- b. Nilai R-square semakin membesar, padahal pada pengujian secara parsial tidak ada pengaruh atau nilai signifikan  $> 0,05$ .
- c. Terjadi perubahan yang berarti pada koefisien model regresi, misal, nilainya menjadi lebih besar atau kecil apabila dilakukan penambahan atau pengurangan sebuah variabel bebas dari model regresi.

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Pengujian ada tidaknya gejala multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Apabila nilai VIF berada dibawah 10,00 dan nilai *Tolerance* lebih dari 0,100, maka diambil kesimpulan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis grafik scatterplot dan uji glejser.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi.

### **3.6.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel**

Menurut **Ajjah, dkk (2013)** ada tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel yaitu *Pooled Square (Common Effect)*, *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Untuk menentukan metode mana yang paling tepat dalam

mengistimasi model regresi data panel maka perlu dilakukan uji spesifikasi model yang terdiri dari uji Chow dan uji Hausman.

### **3.6.3.1 Uji Chow**

Uji Chow digunakan untuk menentukan model analisis data panel yang akan digunakan. Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *Fixed Effect* atau Model *Common Effect* yang sebaiknya dipakai.

H<sub>0</sub> : Common Effect

H<sub>a</sub> : Fixed Effect

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-Square* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Common Effect*. Sebaiknya, apabila probabilitas *Chi-Square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*.

### **3.6.3.2 Uji Hausman**

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut :

H<sub>0</sub> : Random Effect Model

H<sub>a</sub> : Fixed Effect Model

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas *Chi-Square* lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *Random Effect*. Sebaliknya, apabila



probabilitas *Chi-Square* kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *Fixed Effect*.

#### **3.6.4 Analisis Regresi Linear Berganda**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu pengujian pengaruh kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen pajak perusahaan.

Persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1(X1) + b_2 (X2) + b_3 (X3) + e$$

Keterangan:

Y = Manajemen Pajak Perusahaan

X1 = Kompensasi Manajemen

X2 = Kepemilikan Institusional

X3 = Tata kelola Perusahaan.

a = Koefisien Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Standart Error

### 3.6.5 Uji Hipotesis

#### 3.6.5.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Menurut **Priyatno (2013)** uji t digunakan untuk mengetahui apakah X berpengaruh secara signifikan terhadap Y. pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi. Langkah pengujiannya adalah :

1. Merumuskan hipotesis

$H_0$  : X tidak berpengaruh terhadap Y

$H_a$  : X berpengaruh terhadap Y

2. Menentukan t hitung dan signifikansi
3. Menentukan t tabel
4. Kriteria pengujian

Jika t hitung > t tabel, maka  $H_a$  diterima atau

Jika t hitung < t tabel, maka  $H_a$  ditolak. Berdasarkan signifikansi :

- Jika signifikansi > 0,05, maka  $H_0$  diterima
- Jika signifikansi < 0,05, maka  $H_0$  ditolak

5. Membuat kesimpulan

#### 3.6.5.2 Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F)

Uji F ini dilakukan untuk menguji secara serentak variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (**Sugiyono, 2014**). Jika F hitung > F tabel atau sig < 0,05, menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Menurut **Ghozali (2014)** uji F adalah bagian uji statistik yang digunakan untuk menguji suatu kelayakan model regresi dimana variabel independen berpengaruh terhadap dependen. Secara umum merumuskan uji F statistik sebagai berikut :

$$F = \frac{\frac{R^2}{K} - 1}{\frac{1 - R^2}{n}}$$

Keterangan :

$R^2$  = Koefisien Determinasi

K = Jumlah Variabel Independen

n = Jumlah Data dalam Variabel

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang digunakan dalam model penelitian mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.

Cara pengujiannya :

1. Membandingkan antara  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  :

Bila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  : maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  : maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

2. Berdasarkan Profitabilitas

Bila profitabilitas lebih besar daripada 0,05 ( $\alpha$ ), maka variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan bila profitabilitas lebih kecil daripada 0,05 ( $\alpha$ ), maka variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

### **3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) intinya mengukur tingkat ketepatan dari hasil regresi linear berganda yaitu persentase sumbangan (*goodness of fit*) dari variabel bebas terhadap variabel terikat (**Ghozali, 2013**). Pada penelitian ini digunakan *Adjusted R Square* karena variabel bebas yang digunakan lebih dari satu. Tujuan pengukuran *Adjusted R Square* adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu ( $0 \leq \leq 1$ ). Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dengan kata lain, jika ( $R^2$ ) semakin mendekati 100%, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variansi perubahan variabel dependen. Artinya semakin besar ( $R^2$ ), maka akan semakin baik model regresi dengan data yang ada, sehingga semakin tepat model tersebut digunakan dalam menjelaskan variabel dependen oleh variabel independen.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Kompensasi manajemen, kepemilikan institusional dan tata kelola perusahaan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Manajemen pajak perusahaan.
2. Kompensasi manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.
3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.
4. Tata Kelola Perusahaan berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan

- a. Pembayaran pajak akan meningkat apabila menerapkan peraturan pajak secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba seharusnya.
  - b. Perusahaan diharapkan untuk meningkatkan proporsi kepemilikan agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan tingginya proporsi kepemilikan institusional maka pengawasan terhadap kinerja manajemen juga semakin tinggi sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham.
2. Bagi Peneliti Lain atau Peneliti Selanjutnya
- a. Agar penelitian ini lebih bermakna sesuai dengan keterbatasan penelitian ini, maka bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini agar menambahkan variable lain diluar dari variable Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan.
  - b. Sampel yang digunakan untuk penelitian selanjutnya lebih baik jangan hanya pada perusahaan manufaktur tetapi semua perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia agar hasil penelitiannya lebih representatif.
  - c. Penelitian selanjutnya lebih baik menggunakan periode yang lebih panjang agar tren setiap tahunnya dapat mencakup dalam penelitian dan hasilnya lebih representatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul Rohmatul. 2013. *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bell, R. Greeg dan Filatochev, I. 2014. *Corporate Governance and investor Perceptions of foreign IPO value : an Institutional Perspektive*. *Academy Of Management Journal* 57(1).
- Cao, C. dan Petrsek, L. 2014. *Likuidity Risk and Institutional Ownership*. *Journal Of Financial Market* vol 57.
- Diantari, Putu R. 2016. Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana 16(1)
- Erly, Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak*. Jogjakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Aplikasi Analisis Mutivariate dengan Program IBM SPSS* 21. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2017. *Kajian Riset Akuntansi : Mengulas Berbagai Hasil Penelitian Terkini dalam Bidang Akuntansi dan Keuangan*. Jakarta : Grasindo.
- Kadarisman, M. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Manajemen Kompensasi*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Maridasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Jogjakarta : Andi.
- Pohan, chairil A. 2013. *Manajemen perpajakan strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta gramedia pustaka utama
- Prasentyatoko, A. 2008. *Corporate governance pendekatan institusional*. Jakarta : Gramedi Pustaka Utama

- Pratiwi, Maya I. 2016. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan. *Proceeding of management* 3(3).
- Priyatno, Duwi. 2013. Cara Kiat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20, Edisi Kesatu. Yogyakarta : ANDI.
- Putri, M. C. A. 2017. Pengaruh Kompensasi Manajemen, *Corporate Governance*, Reputasi Auditor terhadap Manajemen Pajak. Fakultas Ekonomi Universitas Riau 4(1).
- Puspita, Silvia R. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro Semarang.
- Masngudi, Noor Salim.M. 2012. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Rianda University Press.
- Sambodo, Agus. 2014. *Pajak Dalam Entitas Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Santoso, Y dan Masman, Ronny R. 2016. *A Practical Guidance To Axecutive Compensation Management*. Jakarta : Alex Media Computindo.
- Sari, Diana. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Adi Marta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Bandung : Alfabeta.
- Susyanti dan Dahla. 2016. *Perpajakan (untuk Praktisi dan Akademis)*. Malang : Empat Dua Media.
- Suwandi, Erly.2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta : Salemba Empat.
- S. P, Hasibuan, Malayu. 2013. *Majaemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.
- Winarno, Wing Wahyu. 2015. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Yogyakarta : UPP STIM YKPN Wuryanti. 2015. Pengaruh *Good Corporate Governance, Leverage* dan *Corporate Social Responsibility*



Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar BEI Periode 2010-2013). Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Yuniati,Z,dkk.2017. pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak perusahaan manufaktur di BEI 2011-2015. Forum ilmiah pendidikan akuntansi.vol 5(1)

[www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

[www.kompasekonomi.com](http://www.kompasekonomi.com)

<http://indotaxsolution.blogspot.com/2008/06/pengertian-pajak-adalahmenurut-uu-no28.html>

<http://rjsyahrulloh.blogspot.com/2015/04/manajemen-sdm-kompensasi.html#!/tombak>

## Lampiran 1

### Rekap Tabulasi

#### Manajemen Pajak Perusahaan (Y)

No	Kode	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	ADES	2013	-3.538	59.194	-0,05
		2014	-10490	41.511	0,25
		2015	11.336	44.175	0,25
		2016	5.685	61.636	-0,09
		2017	12.853	51.095	0,25
2	AISA	2013	-102.858	449.586	-0,22
		2014	-106.458	484.592	-0,21
		2015	126.685	500.435	-0,25
		2016	179.203	898.431	-0,19
		2017	120.675,000	-967.484,000	-0,12
3	ALTO	2013	-705.111.619	-10.099.722.108	0,06
		2014	35.576.868	23.889.167.908	0,00
		2015	-14.772	-39.177	0,37
		2016	11.881	-14.620	-0,81
		2017	-234	-24.564	0,01
4	BUDI	2013	-4.337	38.549	-0,11
		2014	14.989	43.488	0,34
		2015	14.995	43.519	0,34
		2016	38.624	52.125	0,74
		2017	45.691	61.016	0,74
5	CEKA	2013	21.484.183.371	86.553.141.929	0,24
		2014	-15.865.132.224	56.866.547.178	-0,27
		2015	-35.721.906.910	142.271.353.890	-0,25
		2016	-36.130.823.829	285.827.837.455	-0,12
		2017	-35.775.052.527	143.195.939.366	-0,24
6	DLTA	2013	-87.897.926	358.395.988	-0,24
		2014	-91.445.380	379.518.812	-0,24
		2015	-58.152.543	250.197.742	-0,23
		2016	-72.538.386	327.047.654	-0,22
		2017	-89.240.218	369.012.853	-0,24
7	DVLA	2013	-49.960.304	175.756.777	-0,28
		2014	-24.936.967	105.866.443	-0,23
		2015	-36.543.278	144.437.708	-0,25

		2016	-62.333.656	214.417.056	-0,29
		2017	-63.898.628	226.147.921	-0,28
8	GGRM	2013	-1.552.272	5.936.204	-0,26
		2014	-1.810.552	7.205.845	-0,25
		2015	-2.182.441	8.635.275	-0,25
		2016	-2.258.454	8.931.136	-0,25
		2017	-2.681.165	10.436.512	-0,25
9	HMSP	2013	-3.691.224	14.509.710	-0,25
		2014	-3.537.216	13.718.299	-0,25
		2015	-3.569.336	13.932.644	-0,25
		2016	-4.249.218	17.011.447	-0,24
		2017	1.268.261	16.894.806	-0,07
10	ICBP	2013	-733.699	2.966.990	-0,24
		2014	-857.044	3.388.725	-0,25
		2015	1.086.486	4.009.634	0,27
		2016	1.357.953	4.989.254	0,27
		2017	1.663.388	5.206.561	0,31
11	IHKP	2013	5.862.351.229	-24.112.748.903	-0,24
		2014	2.978.996.527	-19.021.722.362	-0,15
		2015	-3.658	-19.808	0,18
		2016	-4.639	-32.208	0,14
		2017	-3.526	-14.348	0,24
12	INAF	2013	8.810.151.948	-63.032.747.250	-0,13
		2014	-6.236.811.336	7.401.635.942	-0,84
		2015	-7.609	14.175	-0,53
		2016	-1.554	-18.921	0,00
		2017	-20.935	-85.083	0,00
13	MLBI	2013	-321510	1.267.187	-0,25
		2014	-227.102	1.098.995	-0,20
		2015	-178.663	675.572	-0,26
		2016	-338.057	1.320.186	-0,25
		2017	-457,953	1.780.020	0,00
14	MYOR	2013	342.515.257.778	1.356.073.496.557	0,25
		2014	119.876.262.161	529.701.030.755	0,22
		2015	390.261.637.241	1.640.494.765.801	0,23
		2016	457.007.141.573	1.845.683.269.238	0,24
		2017	555.930.772.581	2.186.884.603.474	0,25
15	ROTI	2013	52.789.633.241	210.804.904.162	0,25
		2014	64.185.387.029	252.762.908.103	0,25
		2015	107.712.914.648	378.251.615.088	0,28
		2016	89.639.472.867	369.416.841.698	0,24

		2017	50.783.313.391	186.147.334.530	0,27
16	SKBM	2013	-20.038.059.647	78.305.045.914	-0,25
		2014	-20.645.137.227	109.761.131.333	-0,18
		2015	-13.479.285.285	53.629.853.878	-0,25
		2016	-8.264.494.258	30.809.950.308	-0,26
		2017	-5.880.557.363	31.761.022.154	-0,18
17	TCID	2013	-58.149.236.079	218.297.701.912	-0,26
		2014	-65.114.435.511	239.428.829.612	-0,27
		2015	-38.647.669.480	583.121.947.494	-0,06
		2016	-59.416.261.296	221.475.857.643	-0,26
		2017	-63.956.663.719	243.083.045.787	-0,26
18	ULTJ	2013	-111.592.767.209	436.720.187.873	-0,25
		2014	-91.996.013.563	375.356.927.774	-0,24
		2015	-177.575.035.200	700.675.250.229	-0,25
		2016	-222.657.146.910	932.482.782.652	-0,23
		2017	-314.550	1.026.231	-0,30
19	UNVR	2013	-1.806.183	7.158.967	-0,25
		2014	-1.938.199	7.675.938	-0,25
		2015	1.977.685	7.829.490	0,25
		2016	-2.181.213	8.571.885	-0,25
		2017	-2.367.099	9.371.661	-0,25
20	WIIM	2013	42.797.081.717	175.119.289.578	0,24
		2014	37.236.710.659	149.541.532.719	0,24
		2015	46.881.830.192	177.962.941.779	0,26
		2016	30.372.690.384	136.662.997.252	0,22
		2017	13.901.517.361	54.491.308.212	0,25
21	MBTO	2013	6.843.350.187	23.006.208.262	0,29
		2014	2.774.368.169	5.699.438.368	0,48
		2015	-2.776.670.972	-16.833.220.866	-0,16
		2016	2.967.619.292	11.781.230.371	-0,25
		2017	6.967.392.602	-31.658.218.720	-0,22

### Kompensasi Manajemen (X1)

No	Kode	Tahun	Kompensasi Manajemen	Ln Kompensasi
1	ADES	2013	5.167.000.000	22,36
		2014	5.808.000.000	22,48
		2015	5.379.000.000	22,41
		2016	4.857.000.000	22,30
		2017	4.329.000.000	22,18
2	AISA	2013	13.035.000.000	23,29
		2014	25.781.000.000	23,97
		2015	21.170.000.000	23,77
		2016	55.596.000.000	24,74
		2017	69.363.000.000	24,96
3	ALTO	2013	2.925.000.000	21,79
		2014	3.388.113.900	21,94
		2015	3.380.428.400	21,94
		2016	3.227.285.500	21,89
		2017	3.227.285.500	21,89
4	BUDI	2013	24.800.000.000	23,93
		2014	29.141.000.000	24,09
		2015	29.271.000.000	24,09
		2016	29.204.000.000	24,09
		2017	38.950.000.000	24,38
5	CEKA	2013	7.878.227.800	22,78
		2014	9.183.142.500	22,94
		2015	20.817.697.600	23,75
		2016	17.506.873.400	23,59
		2017	17.213.053.600	23,56
6	DLTA	2013	13.062.000.000	23,29
		2014	521.089.000.000	23,97
		2015	536.922.000.000	27,00
		2016	538.962.000.000	27,01
		2017	540.608.000.000	27,01
7	DVLA	2013	22.800.000.000	23,85
		2014	24.329.158.000	23,91
		2015	23.632.911.000	23,88
		2016	31.927.920.000	14,18
		2017	41.151.643.000	24,44
8	GGRM	2013	52.392.000.000	24,68
		2014	54.188.000.000	24,71

		2015	61.305.000.000	24,83
		2016	84.744.000.000	25,16
		2017	118.041.000.000	25,49
9	HMSP	2013	94.400.000.000	25,27
		2014	107.900.000.000	25,40
		2015	113.600.000.000	25,45
		2016	123.000.000.000	25,53
		2017	98.500.000.000	25,31
10	ICBD	2013	187.324.000.000	25,95
		2014	177.125.000.000	25,90
		2015	194.598.000.000	25,99
		2016	219.617.000.000	26,11
		2017	236.650.000.000	26,18
11	IHKP	2013	1.625.000.000	21,20
		2014	1.625.000.000	21,20
		2015	1.625.000.000	21,20
		2016	1.625.000.000	21,20
		2017	1.625.000.000	21,20
12	INAF	2013	4.542.240.000	22,23
		2014	3.653.208.000	22,01
		2015	3.976.848.000	22,10
		2016	5.592.044.244	22,44
		2017	5.668.859.542	22,45
13	MLBI	2013	33.095.000.000	24,22
		2014	38.293.000.000	24,36
		2015	39.851.000.000	24,40
		2016	51.957.000.000	24,67
		2017	34.976.000.000	24,27
14	MYOR	2013	158.194.749.063	25,78
		2014	180.234.251.972	25,91
		2015	201.142.891.704	26,02
		2016	254.741.894.895	26,26
		2017	285.196.251.162	26,37
15	ROTI	2013	46.158.176.617	24,55
		2014	37.744.610.114	24,35
		2015	65.934.012.188	24,91
		2016	84.802.715.604	25,16
		2017	87.814.743.757	25,19
16	SKBM	2013	2.339.774.594	21,57
		2014	4.385.134.966	22,20
		2015	4.820.505.454	22,29

		2016	6.041.136.463	22,52
		2017	5.538.281.170	22,43
17	TCID	2013	26.289.868.675	23,99
		2014	27.777.058.974	24,04
		2015	27.924.045.372	24,05
		2016	31.990.011.534	24,18
		2017	33.496.115.472	24,23
18	ULTJ	2013	1.708.000.000	21,25
		2014	2.542.000.000	21,65
		2015	3.600.000.000	22,00
		2016	6.400.000.000	22,57
		2017	8.800.000.000	22,89
19	UNVR	2013	59.993.000.000	24,81
		2014	61.891.000.000	24,84
		2015	58.376.000.000	24,79
		2016	66.940.000.000	24,92
		2017	83.776.000.000	25,15
20	WIIM	2013	12.796.342.764	23,27
		2014	13.016.015.365	23,28
		2015	12.956.998.809	23,28
		2016	13.806.723.857	23,34
		2017	11.920.650.712	23,20
21	MBTO	2013	13.271.205.197	23,30
		2014	14.374.622.469	23,38
		2015	17.008.060.024	23,56
		2016	19.998.926.131	23,71
		2017	20.509.864.995	23,74

### Kepemilikan Institusional (X2)

No	Kode	Tahun	Jumlah Saham Beredar	Saham Yg Dimiliki Institusi	Kepemilikan Institusional
1	ADES	2013	589.896.800	542.347.113	91,93
		2014	589.896.800	542.347.113	91,93
		2015	589.896.800	542.347.113	91,93
		2016	589.896.800	539.896.713	91,52
		2017	589.896.800	639.896.713	108,47
2	AISA	2013	2.926.000.000	1.364.479.446	46,63
		2014	3.218.600.000	1.488.602.500	45,36
		2015	3.218.600.000	1.719.376.120	53,42
		2016	3.218.600.000	3.083.600.000	95,80
		2017	3.218.600.000	3.083.600.000	95,80
3	ALTO	2013	2.184.663.247	1.763.636.499	80,72
		2014	2.186.527.777	1.771.328.807	81,01
		2015	2.186.528.006	1.774.206.505	81,14
		2016	2.186.603.090	1.467.458.005	67,11
		2017	2.191.870.558	1.661.831.838	75,81
4	BUDI	2013	4.098.997.362	2.159.440.831	52,68
		2014	4.098.997.362	2.159.440.831	52,68
		2015	4.498.997.362	2.159.440.831	47,99
		2016	4.498.997.362	2.159.440.831	47,99
		2017	4.498.997.362	2.159.440.831	47,99
5	CEKA	2013	297.500.000	273.735.500	92,01
		2014	297.500.000	273.735.500	92,01
		2015	595.000.000	547.471.000	92,01
		2016	595.000.000	551.971.000	92,76
		2017	595.000.000	551.971.000	92,76
6	DLTA	2013	16.013.181	13.078.143	81,67
		2014	16.013.181	13.078.143	81,67
		2015	800.659.050	653.907.150	81,67
		2016	800.659.050	653.907.150	81,67
		2017	800.659.050	653.907.150	81,67
7	DVLA	2013	1.120.000.000	1.037.800.912	92,66
		2014	1.115.925.300	1.037.800.912	92,99
		2015	1.115.925.300	1.037.800.912	92,99
		2016	1.115.925.300	1.031.800.921	92,46
		2017	1.115.925.300	1.031.800.912	92,46
8	GGRM	2013	1.924.088.000	1.453.589.500	75,54



		2014	1.924.088.000	1.453.589.500	75,54
		2015	1.924.088.000	1.906.385.800	99,07
		2016	1.924.088.000	1.911.141.070	99,32
		2017	1.924.088.000	1.911.141.070	99,32
9	HMSP	2013	4.383.000.000	4.303.168.205	98,17
		2014	4.383.000.000	4.303.168.205	98,17
		2015	4.652.723.076	4.303.768.845	92,49
		2016	116.318.076.900	107.594.221.125	92,49
		2017	116.318.076.900	107.594.221.125	92,49
10	ICBP	2013	5.830.954.000	4.695.839.000	80,53
		2014	5.830.954.000	4.695.839.000	80,53
		2015	5.830.954.000	4.695.839.000	80,53
		2016	11.661.908.000	9.391.678.000	80,53
		2017	11.661.908.000	9.391.678.000	80,53
11	IIKP	2013	3.328.000.000	1.909.902.194	57,38
		2014	3.328.000.000	1.592.067.106	47,83
		2015	3.328.000.000	1.592.067.106	47,83
		2016	3.328.000.000	442.211.242	13,28
		2017	33.280.000.000	6.426.109.040	19,30
12	INAF	2013	309.926.750.000	250.000.000.000	80,66
		2014	309.926.750.000	250.000.000.000	80,66
		2015	309.925.750.000	269.999.649.900	87,11
		2016	309.925.750.000	269.999.649.900	87,11
		2017	309.925.750.000	271.861.275.000	87,11
13	MLBI	2013	21.070.000	17.389.130	82,53
		2014	2.107.000.000	1.723.151.000	81,78
		2015	2.107.000.000	1.723.151.000	81,78
		2016	2.107.000.000	1.723.151.000	81,78
		2017	2.107.000.000	1.723.151.000	81,78
14	MYOR	2013	894.347.989	295.479.585	33,03
		2014	894.347.989	295.479.585	33,03
		2015	894.347.989	295.479.585	33,03
		2016	22.358.699.725	13.207.471.425	59,07
		2017	22.358.699.725	13.207.471.425	59,07
15	ROTI	2013	5.061.800.000	3.581.223.500	70,75
		2014	5.061.800.000	3.581.223.500	70,75
		2015	5.061.100.000	3.581.223.500	70,75
		2016	5.061.100.000	3.511.225.000	69,37
		2017	6.186.488.888	4.348.028.207	70,28
16	SKBM	2013	865.736.394	700.518.609	80,91
		2014	936.530.894	762.561.509	81,42

		2015	936.530.894	753.778.709	80,48
		2016	936.530.894	755.074.606	80,62
		2017	1.726.003.217	1.429.025.322	82,79
17	TCID	2013	201.066.667	158.542.025	78,85
		2014	201.066.667	158.522.025	78,84
		2015	201.066.667	148.334.763	73,77
		2016	201.066.667	148.334.763	73,77
		2017	201.066.667	184.428.496	91,72
18	ULTJ	2013	2.888.382.000	1.766.002.526	61,14
		2014	2.888.382.000	1.768.723.526	61,23
		2015	2.888.382.000	1.709.103.926	59,17
		2016	2.888.382.000	1.309.427.365	45,33
		2017	2.888.382.000	1.309.427.365	45,33
19	UNVR	2013	7.630.000.000	6.484.877.500	84,99
		2014	7.630.000.000	6.484.877.500	84,99
		2015	7.630.000.000	6.484.877.500	84,99
		2016	7.630.000.000	6.484.877.500	84,99
		2017	7.630.000.000	6.484.877.500	84,99
20	WIIM	2013	2.099.873.760	472.018.070	22,47
		2014	2.099.873.760	472.018.070	22,47
		2015	2.099.873.760	472.018.070	22,47
		2016	2.099.873.760	580.018.070	27,62
		2017	2.099.873.760	108.000.000	5,14
21	MBTO	2013	1.070.000.000	724.928.500	67,75
		2014	1.070.000.000	724.928.500	67,75
		2015	1.070.000.000	724.928.500	67,75
		2016	1.070.000.000	724.928.500	67,75
		2017	1.070.000.000	724.928.500	67,75

### Tata Kelola Perusahaan (X3)

No	Kode	Tahun	Dewan Komisaris	Komisaris Independent	Cr
1	ADES	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
2	AISA	2013	6	1	0,16
		2014	5	1	0,20
		2015	5	1	0,20
		2016	5	1	0,20
		2017	5	1	0,20
3	ALTO	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	2	1	0,50
4	BUDI	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
5	CEKA	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
6	DLTA	2013	5	2	0,40
		2014	5	2	0,40
		2015	5	2	0,40
		2016	5	2	0,40
		2017	5	2	0,40
7	DVLA	2013	7	2	0,28
		2014	7	2	0,28
		2015	6	2	0,33
		2016	7	3	0,42
		2017	7	3	0,42
8	GGRM	2013	3	1	0,33

		2014	4	2	0,50
		2015	4	2	0,50
		2016	4	2	0,50
		2017	4	2	0,50
9	HMSP	2013	6	3	0,50
		2014	6	3	0,50
		2015	5	3	0,60
		2016	5	3	0,60
		2017	5	3	0,60
10	ICBP	2013	7	3	0,42
		2014	7	3	0,42
		2015	6	3	0,50
		2016	6	3	0,50
		2017	6	3	0,50
11	IIKP	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
12	INAF	2013	4	2	0,50
		2014	3	3	1,00
		2015	3	2	0,66
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
13	MLBI	2013	7	4	0,57
		2014	8	4	0,50
		2015	7	4	0,57
		2016	7	4	0,57
		2017	6	3	0,50
14	MYOR	2013	5	2	0,40
		2014	5	2	0,40
		2015	5	2	0,40
		2016	5	2	0,40
		2017	5	2	0,40
15	ROTI	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
16	SKBM	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33

		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
17	TCID	2013	5	2	0,40
		2014	5	2	0,40
		2015	6	2	0,33
		2016	5	2	0,40
		2017	6	3	0,50
18	ULTJ	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
19	UNVR	2013	5	4	0,80
		2014	5	4	0,80
		2015	5	4	0,80
		2016	5	4	0,80
		2017	5	4	0,80
20	WIIM	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33
21	MBTO	2013	3	1	0,33
		2014	3	1	0,33
		2015	3	1	0,33
		2016	3	1	0,33
		2017	3	1	0,33

## Lampiran 2

### Tabulasi Data Eviews

KODE	TAHUN	Y	X1	X2	X3
ADES	2013	-0,05	22,36	91,93	0,33
ADES	2014	0,25	22,48	91,93	0,33
ADES	2015	0,25	22,41	91,93	0,33
ADES	2016	-0,09	22,30	91,52	0,33
ADES	2017	0,25	22,18	108,47	0,33
AISA	2013	-0,22	23,29	46,63	0,16
AISA	2014	-0,21	23,97	45,36	0,20
AISA	2015	-0,25	23,77	53,42	0,20
AISA	2016	-0,19	24,74	95,80	0,20
AISA	2017	-0,12	24,96	95,80	0,20
ALTO	2013	0,06	21,79	80,72	0,33
ALTO	2014	0,00	21,94	81,01	0,33
ALTO	2015	0,37	21,94	81,14	0,33
ALTO	2016	-0,81	21,89	67,11	0,33
ALTO	2017	0,01	21,89	75,81	0,50
BUDI	2013	-0,11	23,93	52,68	0,33
BUDI	2014	0,34	24,09	52,68	0,33
BUDI	2015	0,34	24,09	47,99	0,33
BUDI	2016	0,74	24,09	47,99	0,33
BUDI	2017	0,74	24,38	47,99	0,33
CEKA	2013	0,24	22,78	92,01	0,33
CEKA	2014	-0,27	22,94	92,01	0,33
CEKA	2015	-0,25	23,75	92,01	0,33
CEKA	2016	-0,12	23,59	92,76	0,33
CEKA	2017	-0,24	23,56	92,76	0,33
DLTA	2013	-0,24	23,29	81,67	0,40
DLTA	2014	-0,24	23,97	81,67	0,40
DLTA	2015	-0,23	27,00	81,67	0,40
DLTA	2016	-0,22	27,01	81,67	0,40
DLTA	2017	-0,24	27,01	81,67	0,40
DVLA	2013	-0,28	23,85	92,66	0,28
DVLA	2014	-0,23	23,91	92,99	0,28
DVLA	2015	-0,25	23,88	92,99	0,33
DVLA	2016	-0,29	14,18	92,46	0,42
DVLA	2017	-0,28	24,44	92,46	0,42

GGRM	2013	-0,26	24,68	75,54	0,33
GGRM	2014	-0,25	24,71	75,54	0,50
GGRM	2015	-0,25	24,83	99,07	0,50
GGRM	2016	-0,25	25,16	99,32	0,50
GGRM	2017	-0,25	25,49	99,32	0,50
HMSP	2013	-0,25	25,27	98,17	0,50
HMSP	2014	-0,25	25,40	98,17	0,50
HMSP	2015	-0,25	25,45	92,49	0,60
HMSP	2016	-0,24	25,53	92,49	0,60
HMSP	2017	-0,07	25,31	92,49	0,60
ICBP	2013	-0,24	25,95	80,53	0,42
ICBP	2014	-0,25	25,9	80,53	0,42
ICBP	2015	0,27	25,99	80,53	0,50
ICBP	2016	0,27	26,11	80,53	0,50
ICBP	2017	0,31	26,18	80,53	0,50
IIKP	2013	-0,24	21,20	57,38	0,33
IIKP	2014	-0,15	21,20	47,83	0,33
IIKP	2015	0,18	21,20	47,83	0,33
IIKP	2016	0,14	21,20	13,28	0,33
IIKP	2017	0,24	21,20	19,30	0,33
INAF	2013	-0,13	22,23	80,66	0,50
INAF	2014	-0,84	22,01	80,66	1,00
INAF	2015	-0,53	22,10	87,11	0,66
INAF	2016	0,00	22,44	87,11	0,33
INAF	2017	0,00	22,45	87,11	0,33
MLBI	2013	-0,25	24,22	82,53	0,57
MLBI	2014	-0,20	24,36	81,78	0,50
MLBI	2015	-0,26	24,40	81,78	0,57
MLBI	2016	-0,25	24,67	81,78	0,57
MLBI	2017	0,00	24,27	81,78	0,50
MYOR	2013	0,25	25,78	33,03	0,40
MYOR	2014	0,22	25,91	33,03	0,40
MYOR	2015	0,23	26,02	33,03	0,40
MYOR	2016	0,24	26,26	59,07	0,40
MYOR	2017	0,25	26,37	59,07	0,40
ROTI	2013	0,25	24,55	70,75	0,33
ROTI	2014	0,25	24,35	70,75	0,33
ROTI	2015	0,28	24,91	70,75	0,33
ROTI	2016	0,24	15,16	69,37	0,33
ROTI	2017	0,27	25,19	70,28	0,33
SKBM	2013	-0,25	21,57	80,91	0,33

SKBM	2014	-0,18	22,20	81,42	0,33
SKBM	2015	-0,25	22,29	80,48	0,33
SKBM	2016	-0,26	22,52	80,62	0,33
SKBM	2017	-0,18	22,43	82,79	0,33
TCID	2013	-0,26	23,99	78,85	0,40
TCID	2014	-0,27	24,04	78,84	0,40
TCID	2015	-0,06	24,05	73,77	0,33
TCID	2016	-0,26	24,18	73,77	0,40
TCID	2017	-0,26	24,23	91,72	0,50
ULTJ	2013	-0,25	21,25	61,14	0,33
ULTJ	2014	-0,24	21,65	61,23	0,33
ULTJ	2015	-0,25	22,00	59,17	0,33
ULTJ	2016	-0,23	22,57	45,33	0,33
ULTJ	2017	-0,30	22,89	45,33	0,33
UNVR	2013	-0,25	24,81	84,99	0,80
UNVR	2014	-0,25	24,84	84,99	0,80
UNVR	2015	0,25	24,79	84,99	0,80
UNVR	2016	-0,25	24,92	84,99	0,80
UNVR	2017	-0,25	25,15	84,99	0,80
WIIM	2013	0,24	23,27	22,47	0,33
WIIM	2014	0,24	23,28	22,47	0,33
WIIM	2015	0,26	23,28	24,47	0,33
WIIM	2016	0,22	23,34	27,62	0,33
WIIM	2017	0,25	23,20	5,14	0,33
MBTO	2013	0,29	23,30	67,75	0,33
MBTO	2014	0,48	23,38	67,75	0,33
MBTO	2015	-0,16	23,56	67,75	0,33
MBTO	2016	-0,25	23,71	67,75	0,33
MBTO	2017	-0,22	23,74	67,75	0,33



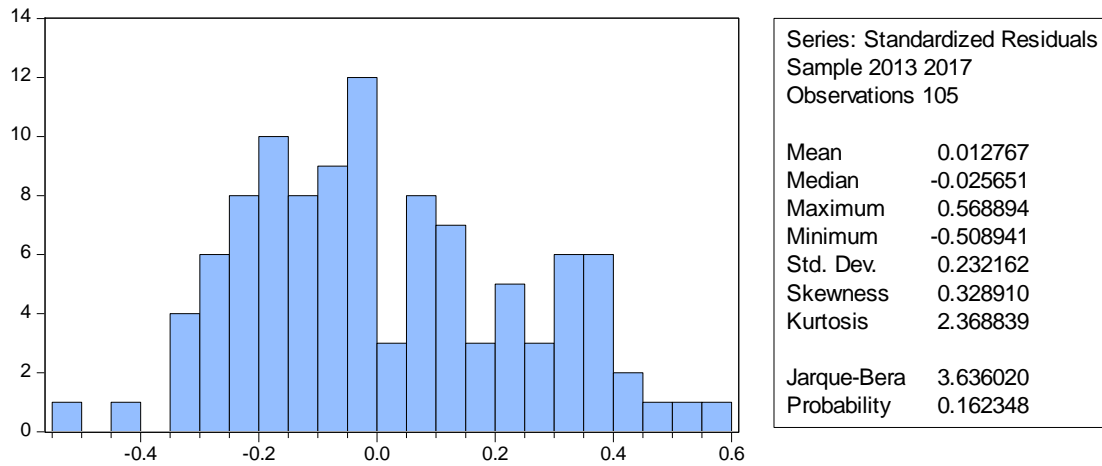
### Lampiran 3

### Hasil Eviews 9

### Uji Statistic Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	-0.062000	23.65419	72.71343	0.403714
Median	-0.200000	23.91000	80.62000	0.330000
Maximum	0.740000	27.01000	108.4700	1.000000
Minimum	-0.840000	14.18000	5.140000	0.160000
Std. Dev.	0.276014	1.940817	21.81133	0.141607
Observations	105	105	105	105

### Uji Normalitas Jarque-Bera Test



### Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.000168	160.1592	1.060871
X2	1.38E-06	13.48171	1.103184
X3	0.034339	10.65253	1.157115
C	0.091908	155.9280	NA

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.119889	Prob. F(3,101)	0.3447
Obs*R-squared	3.380281	Prob. Chi-Square(3)	0.3366
Scaled explained SS	3.429705	Prob. Chi-Square(3)	0.3300

### Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.105992	(20,81)	0.0000

Cross-section Chi-square	73.503781	20	0.0000
--------------------------	-----------	----	--------

---

---

**Hasil Uji Hausman**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

---

---

	Chi-Sq.		
Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.129312	3	0.1055

---

---

**Hasil Estimasi *Random Effect Model***

---

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.009715	0.013147	0.738931	0.4617
X2	-0.002672	0.001534	-1.741652	0.0846
X3	-0.606858	0.221971	-2.733957	0.0074
C	0.147497	0.325986	0.452465	0.6519

---

---

### Hasil Uji F-Statistik

---

F-statistic	4.229223
Prob(F-statistic)	0.007349

---

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

---

---

R-squared	0.111601	Mean dependent var	-0.030185
Adjusted R-squared	0.085213	S.D. dependent var	0.207817

---

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

**NAMA** : WINDA DIKA APRILIA PRATAMA  
**NO BP** : 16101155110164  
**PROGRAM STUDI** : S1-AKUNTANSI  
**JUDUL PENELITIAN** : Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemimpinan  
Institusional dan Tata Kelola Perusahaan  
berhadap Manajemen Pajak Perusahaan  
pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar  
di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

**DOSEN PEMBIMBING** : 1 YOSI JULIA SE, MM, AK, CA  
② RIMDY CITRA DEWI, SE, MM

Wajib ditempel  
Pas Foto  
Pakai Almamater 4x6



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"  
PADANG - INDONESIA**

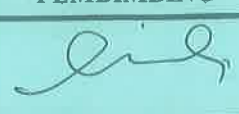









**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "PTK" PADANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : WINDA DIKA APRILIA PRATAMA  
 NOMOR BP : 15101155110164  
 PROGRAM STUDI : SI - AKUNTANSI  
 JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Kompensasi Manajemen, Kepemilikan Institusional dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yg terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017.

DOSEN PEMBIMBING 1 JOSI JULIA, SE,MM,AK,CA  
 2 KINDY CITRA DEWI, SE,MM

VII

TANGGAL KONSULTASI	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
11 / 10 18	Perbaiki bab I (Fenomena)	
	Perbaiki bab II (buku judul, tambah teori)	
	Perbaiki bab III (untuk isi bab III)	
5 / 11 18	Perbaiki lagi bab I, II, III	
21 / 11 18	Perbaiki & lanjut bab IV	
8 / 1 19	Perbaiki & lanjut bab V	
14 / 1 19	Perbaiki lagi	
16 / 1 19	Perbaiki lagi	
17 / 1 19	Perbaiki lagi	
	Perbaiki + Orzpt + Print Bersih Kumpul I-V	

**KETENTUAN**

1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 5 (lima) kali
2. Setiap konsultasi harus membawa kartu bimbingan
3. Kartu yang hilang atau tidak dibawa saat konsultasi tidak dilayani
4. Jika tidak memenuhi kriteria diatas, Skripsinya DIBATALKAN

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG**

**NAMA** : WINDA DIKA APRILIA PRATAMA  
**NO BP** : 15101195110164  
**PROGRAM STUDI** : S1 AKUNTANSI  
**JUDUL PENELITIAN** : PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, KEPEMILIHAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PADAK PERUSAHAAN STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DIBURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017.

**DOSEN PEMBIMBING** : ① JOSI YULIA, SE, MM, AK, CA  
2 RINDY CITRA DEWI, SE, MM

Wajib ditempel  
Pas Foto  
Pakai Almamater 4x6



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK"  
PADANG - INDONESIA**











**UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : WINDA DIKA APRILIA PRATAMA  
 NOMOR BP : 15101155110164  
 PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI  
 JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN PADAK PERUSAHAAN STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2013-2017.

DOSEN PEMBIMBING <sup>1</sup> TOSI YULIA, SE, MM, AK, CA  
<sup>2</sup> RIFIDY CITRA DEWI, SE, MM

VII

TANGGAL KONSULTASI	KOMENTAR PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
3/1-2019	Perbaiki bab I 5/6 III	
7/1-2019	Perbaiki ...	
10/1-2019	Perbaiki... Lanjut bab 15	
11/1-2019	Perbaiki...	
12/1-2019	Perbaiki	
14/1-2019	Perbaiki...	
15/1-2019	Sempurnakan	
16/1-2019	Draft	
17/1-2019	Print Bersih	
18/1-2019	Acc	

**KETENTUAN**

1. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing minimal 5 (lima) kali
2. Setiap konsultasi harus membawa kartu bimbingan
3. Kartu yang hilang atau tidak dibawa saat konsultasi tidak dilayani
4. Jika tidak memenuhi kriteria diatas, Skripsinya DIBATALKAN



## **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Winda Dika Aprilia Pratama**

No. BP : **15101155110164**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**

Jurusan : **Akuntansi**

Menyatakan bahwa :

1. Sesungguhnya skripsi yang saya susun ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya orang lain, telah saya tuliskan sumbernya dengan jelas, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.
2. Jika dalam pembuatan skripsi baik pembuatan program/alat maupun skripsi secara keseluruhan terbukti dibuatkan orang lain maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan akademik, berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian serta mengajukan judul yang baru.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Padang, Januari 2019

Saya yang menyatakan,

**WINDA DIKA APRILIA PRATAMA**  
**15101155110164**

**PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN,  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN  
( Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek**

**Indonesia Tahun 2013-2017)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**WINDA DIKA APRILIA PRATAMA**  
**15101155110164**

Telah memenuhi persyaratan untuk di uji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada Ujian Komprehensif

Padang, Januari 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**YOSI YULIA, S.E., M.M., Ak, CA.**  
**NIDN : 1017047602**

**RINDY CITRA DEWI, S.E., M.M.**  
**NIDN : 1019059202**

**PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN,  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN  
(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia tahun 2013-2017)**

Telah diajukan dan dipertahankan di depan Ujian Komperhensif pada Fakultas  
Ekonomi Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

Padang, Januari 2019

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. ( )
2. ( )

Padang, Januari 2019

Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

**Dr. H. ELFISWANDI, S.E., M.M., Ak, CA.**  
NIDN : 10190496601

**PENGARUH KOMPENSASI MANAJEMEN,  
KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PERUSAHAAN  
(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia tahun 2013-2017)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**WINDA DIKA APRILIA PRATAMA**  
**15101155110164**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal Januari 2019  
Dan dinyatakan telah lulus memenuhi persyaratan.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**YOSI YULIA, S.E., M.M., Ak, CA.**  
**NIDN : 1017047602**

**RINDY CITRA DEWI, S.E., M.M.**  
**NIDN : 1019059202**

Padang, Januari 2019

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang

**Dr. H. ELFISWANDI, S.E., M.M., Ak, CA.**  
**NIDN : 10190496601**